TESIS

**IMPLEMENTASI WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PADA PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD
DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI SULAWESI SELATAN**

***THE IMPLEMENTATION OF PROVIANCIAL GENERAL ELECTION
COMMISSION'S AUTHORITY IN THE VOTER REGISTRATION AND
LEGISLATIVE MEMBER OF PARLIAMENT NOMINATION IN THE
LEGISLATIVE GENERAL ELECTION IN SOUTH SULAWESI***

P A T A W A R I

**PROGRAM PASCASAJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2007

**IMPLEMENTASI WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PADA PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD
DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI SULAWESI SELATAN**

***THE IMPLEMENTATION OF PROVIANCIAL GENERAL ELECTION
COMMISSION'S AUTHORITY IN THE VOTER REGISTRATION AND
LEGISLATIVE MEMBER OF PARLIAMENT NOMINATION IN THE
LEGISLATIVE GENERAL ELECTION IN SOUTH SULAWESI***

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum

Program Studi

Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

P A T A W A R I

**PROGRAM PASCASAJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2007

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : PATAWARI
Nomor Mahasiswa : P090420501O
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 8 Agustus 2007

Yang menyatakan

P A T A W A R I

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT degan selesainya tesis ini, dengana judul ” *Implementasi Wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada pendaftaran pemilih dan pencalonan anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Sulawesi Selatan*

Gagasan awal dari tajuk permasalahan ini timbul dari hasil pengamatan penulis terhadap situasi politik yaitu pada proses dan pasca pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Sulawesi Selatan yang banyak disoroti adalah penyelenggaraan pemilihan (Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan). Terutama pada pelaksanaan pencalonan anggota DPRD dan pendaftaran pemilih. Penulis bermaksud memberikan sumbangsi pemikiran untuk melaksanakan pemilihan umum demokratis dan berkedaulatan rakyat.

Pada wilayah penelitian sebagai yang begitu luas, sebagai sample adalah Kabuapeten Bulukuma, Bone, dan Barru. Penulis megalami banyak kendala pada penyusunan pada tesis ini, hanya berkat bantuan berbagai pihak, maka tesis ini selesai tepat waktu.

Pada kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada kepada Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H selaku Ketua Penasehat. Dr. Mas Bakar, selaku anggota penasehat yang banyak

memberikan sumbangsi pemikiran dalam membantu menyelesaikan tesis ini atas serba kekurangan yang dimiliki oleh penulis.

Terima kasih juga disampaikan kepada Ketua KPUD Provinsi Sulawesi Selatan Mappinawang, S.H., M.H. dan seluruh anggota KPUD Provinsi Sulawesi Selatan dan stafnya. Kepada Anggota KPUD Kabupaten Bulukumba kakanda Arum Spink, S.Hi, ketua KPUD Bone Ali Imran dan anggotanya, Ketua KPUD Barru Kakanda Husaema Daud, S.Hi dan anggotanya, dan kepada seluruh anggota PPK, PPS dan masyarakat sebagai responden, kepada Syamsari dari partai politik PKS yang banyak memberikan masukan dan input data sehingga tesis ini dapat selesai tepat waktu.

Terima kasih juga disampaikan kepada penguji tesis ini yang memberikan bimbingan, masukan, dan keritikan konstruktif kiranya tesis ini dapat lebih baik, yaitu kepada Dr. Awanto, S.H., M.Si., DFM. Dr. A. Pangerang Moentha, SH. MH. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.

Makassar, 31 Agustus 2007

P A T A W A R I

DAFTAR ISI

Halaman

Sampul Tesis

Halaman Judul	i
Halaman pengajuan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Lembar pernyataan keaslian	iv
Kata Pengantar /Prakata	v
Abstrak	vii
Abstrack	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengetian Wewenang	12
B. Konsep Demokrasi & Kedaulatan	17
1. Demokrasi	17
2. Kedaulatan	20

C. Pemilihan Umum	21
D. Legislatif	23
E. Komisi Pemilihan Umum	23
F. Sistem Pemilihan di Indonesia	30
G. Kerangka Pikir	41
H. Definisi Operasional	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Tipe Penelitian	43
B. Lokasi dan waktu Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Data	44
D. Populasi dan Sampel	44
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Deskripsi Singkat Pelaksanaan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilu DPRD di Sulawesi Selatan Tahun 2004	46
1. Pendaftaran Pemilih	45
2. Pencalonan Anggota DPRD Sulawesi Selatan	58
a). <i>Mekanisme Pembentukan Panitia pendaftaran dan penelitian Calon anggota DPRD</i>	69
b). <i>Penelitian Calon Anggota DPRD Provinsi</i>	73
c). <i>Penyampaian hasil Penelitian kepada Partai Politik peserta pemilu</i>	75
B. Pelaksanaan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten pada pendaftaran pemilih	79

1. KPU Provinsi Sulawesi Selatan	79
2. KPU Kabupaten Bulukumba	88
3. KPU Kabupaten Bone	93
4. KPU Kabupaten Barru	98
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

ABSTRAK

PATAWARI, *Implementasi Wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Pendaftaran Pemilih dan Pencalonan Anggota Dprd Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Sulawesi Selatan* (dibimbing oleh Aminuddin Ilmar, dan Mas Bakar)

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kewenangan KPU Provinsi pada pendaftaran pemilih pada pemilihan umum legislatif di Sulawesi Selatan tahun 2004 secara demokratis dan berkedaulatan rakyat; Menjelaskan wewenang komisi pemilihan umum dalam proses pencalonan DPRD Provinsi pada pemilihan umum yang demokratis dan berkedaulatan rakyat

Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Sample dipilih secara purposif, yaitu anggota KPU Bulukumba, anggota KPU, Bone, dan anggota KPU Barru. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survey, kuesioner, wawancara kepada satu orang anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan; dan masing-masing satu orang anggota KPU, PPK, PPS dan masyarakat Kabupaten Bulukumba, Bone, dan Barru. Data dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Sulawesi Selatan pada mekanisme pendaftaran pemilih dilaksanakan sesuai dengan aturan keputusan KPU. namun memiliki tingkat kesalahan pada jumlah pemilih tetap karena tidak sesuai dengan jumlah pemilih tetap sebagaimana dimaksudkan dalam keputusan KPU. Pencalonan anggota DPRD Provinsi dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan tahap pencalonan sesuai yang diatur dalam keputusan KPU. Namun transparansi pada tentang tingkat akurasi berkas pencalonan DPRD Sulawesi Selatan sangat kurang.

Abstrck

PATAWARI, *The Implementation of Provincial General Election Commission's Authority in the Voter Registration and Legislative Member of Parliament Nomination in the Legislative General Election in South Sulawesi* (supervised **Aminuddin Ilmar** and **Mas Bakar**)

The study is devoted to depicting the implementation of the authority of provincial general election commission in the voter registration and legislative member nomination in the legislative general election in South Sulawesi in 2004 democratically, and publicly; explaining the general election commission's authority in the nomination procces of the legislative member of parliament.

The study is conducted to the provincial general election commission of South Sulawesi. The samples are Bulukumba, Bone, and Barru Regional General Election Commissions. The study is field suvey involving interviews with and distributing questionnaire to the members of each commission and the members of society.

The result shows that the implementation of the general election to vote for members of parliament in South Sulawesi has complied with the decree of the commission but there is some mismatch of the number of fixed voters in the list compared to the ones of the commission. The nomination of the members of provincial parliament has been performed in line with the central general election commission's decree, despite the lack of transparency in accuracy of requirement fulfilments of the candidates.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia merupakan manifestasi demokrasi. Dalam pemilihan umum, masyarakat diberi ruang apresiasi dalam menentukan hak politiknya untuk agenda lima Tahun perjalanan suatu negara.

Pemilihan umum merupakan momentum tepat dalam mengimplementasikan hak warga negara untuk menjalankan kedaulatan. Bahwa pada pemilihan umum menjadi sebuah harapan kiranya masyarakat berpartisipasi aktif pada pemilihan umum sehingga terwujud masyarakat yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.

Pada pemilihan umum menjadi sebuah harapan bahwa masyarakat dapat melaksanakan kedaulatannya untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk pada Lembaga Perwakilan Rakyat (Legislatif), bagi yang telah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya. Demikian pada pemilihan umum legislatif Tahun 2004 Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan harapan masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih akan melakukan pemilihan.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum yang terstruktur mulai dari tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,

yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pemilihan umum. Sebagai persiapannya adalah melakukan pendataan untuk calon pemilih. Dalam pendataan pemilih diharapkan seluruh masyarakat yang memenuhi syarat yaitu yang telah berumur 17 ke atas atau telah menikah. Harus terdaftar sebagai pemilih. Bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali, yang telah memenuhi syarat maka berhak untuk memberikan hak pilihnya,

Hak masyarakat yang dimaksud adalah menjadi kewajiban penyelenggara pemilihan umum untuk menyediakan fasilitas, pelayanan kiranya dapat memberikan hak pilihnya. Dan juga secara prosedural penyelenggara pemilihan umum melakukan pendataan jumlah potensi pemilih dengan professional kiranya yang telah memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih tetap.

Maka pada pendaftaran pemilih tetap, kinerja awal KPU Kabupaten/Kota harus lebih lihai dan penuh kehati-hatian, sebab sangat potensial untuk tidak terlaksananya demokrasi secara umum. Akan dimungkinkan masyarakat berhak memberikan hak pilihnya akan tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih .

Kinerja awal KPU Kabupaten/Kota dimaksudkan adalah guna membantu KPU Kabupaten/Kota maka ditingkat kecamatan dan desa/Kelurahan yang dibentuk Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia pemungutan suara (PPS). Baik buruknya kinerja PPK dan PPS

adalah sangat menentukan implementasi hak masyarakat dalam memberikan hak pilihnya.

Banyak kemungkinan masyarakat tidak memberikan hak pilihnya adalah dimungkinkan karena, masyarakat tidak terdaftar sebagai pemilih, meninggalkan tempat sehingga di tempat lain tidak melapor ke TPS sebagai pemilih, terdaftar sebagai pemilih akan tetapi mendapatkan figure yang dianggap layak untuk dipilih hak tersebut juga merupakan pilihan/bagian dari demokrasi.

Demikian juga pada pendaftaran peserta Pemilihan Umum legislatif tingkat Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dapat menyeleksi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana aturan yang telah ditetapkan. Komisi Pemilihan Umum tidak diskriminatif, bahwa siapapun calon legislatif yang memenuhi syarat sebagaimana dalam peraturan, maka diberikan ruang untuk menjadi calon legislatif.

Bahwa sistem pemilihan umum senantiasa mengalami perubahan, adalah sesuai dengan kondisi sosio, kultur, dan politik masyarakat saat itu. Pertama kali dilaksanakan Pemilihan Umum adalah pada bulan Desember 1955, sebagai payung hukum undang-undang No 7 Tahun 1953. Pemilihan umum berdasarkan undang-undang No 7 Tahun 1953 dimaksudkan adalah untuk memilih anggota DPR dan memilih anggota dewan konstituante.

Hasil dan proses pemilihan umum Tahun 1955, patut dijadikan sebagai landasan demokratisasi di Indonesia, sebab Indonesia baru pertama

kali melaksanakan pemilihan umum dan hasilnya adalah sangat baik; aman, jujur, dan adil. Dilain sisi, tidak adanya pejabat negara yang kebetulan menjadi kandidat menggunakan fasilitas negara, demikian juga dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki tidak dipergunakan dalam mengarahkan pemilih untuk kepentingan politik partainya. Apresiasi hasil demokrasi yang berjalan pada Tahun 1955 mendapat pujian dari kalangan pribumi dan juga adalah pengamat asing, yang kebetulan menyaksikan jalannya pemilihan umum Tahun 1955.

Kekecewaan masyarakat terhadap proses demokrasi dalam pemilihan umum yang lalu karena banyaknya janji-janji politik yang dilakukan oleh politisi, masyarakat sudah sadar akan janji –janji politik sehingga memutuskan untuk tidak memilih (golput).

Ekspresi golongan putih (golput), juga telah menjadi bagian demokrasi, tentu tidak bisa dielakkan dalam setiap momen pemilihan umum. Menurut persepsi ahli-ahli politik, golput itu sendiri adalah sebagai bentuk manifestasi dari demokrasi. Melakukan sikap golput karena tidak ada pilihan baginya baik terhadap partai maupun terhadap kandidat yang diusung dan atau ditetapkan KPU. Itulah sebabnya diperlukan penguatan sistem kepartaian dalam rangka perjalanan sebuah sistem politik yang demokratis. Walaupun secara internal, partai politik (partai politik) masih banyak menyisakan masalah yang pelik terkadang sungguh amat ironis, karena gagal mempraktekkan demokrasi internal mereka sendiri.

Demikian pada pemilihan umum legislatif di Provinsi Sulawesi Selatan bahwa tidak sedikit warga masyarakat memilih untuk tidak memilih pada pemilihan anggota legislatif atau diistilahkan dengan golput.

Oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi harus mengoptimalkan fungsi dan perannya secara baik, khususnya dalam konteks pendidikan politik, sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat, melakukan pendataan secara akurat untuk mempersiapkan warga masyarakat melakukan hak pilihnya.

Hakekat demokrasi adalah rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Masyarakat sebagai kekuatan utama demokrasi harus turut mengawasi proses pemilihan umum, masyarakat harus berpartisipasi dalam pemilihan umum, dalam momen politik tidak diposisikan sebagai penonton tetapi menjadi actor utama demokrasi. Meminjam istilah Eep Saifulah Fatah (2005 : 4) bahwa “penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung sangat erat kaitannya dengan demokrasi di mana kedaulatan terletak ditangan rakyat”. Seharusnya rakyat adalah subyek yang menentukan, bukan obyek yang ditentukan, baik dalam lingkup perpolitikan nasional maupun lokal (daerah).

Fenomena lain bahwa penyelenggaraan pemilihan umum memang diakibatkan nihilnya pengetahuan anggota Komisi Pemilihan Umum tentang norma yang harus dijalankan berdasarkan aturan yang ada. Hal ini bisa terjadi akibat kredibilitas dan disiplin ilmu yang tidak berbasis hukum,

Pada Pemilihan Umum adalah adanya calon legislatif (peserta pemilihan umum) yang menggunakan ijasa palsu, dimaksudkan adalah adanya penggunaan ijasah yang tidak mempunyai legalisir, ijazah yang tidak ada stample, dan tidak mempunyai keterangan dari instansi bersangkutan.

Demikian juga dengan bolak baliknya berkas calon anggota legislatif dari partai untuk didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Bahwa penentuan calon legilatif adalah dilaksanakan oleh partai politik bukan KPU Provinsi sebagai penyelenggara pemilihan umum di di provinsi.

Sistem pendataan dan pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum tidak dilakukan secara cermat oleh petugas pencatat pemilihan. banyak anggota masyarakat yang tidak terdaftar sehingga tidak dapat menyalurkan aspirasinya dalam pemilihan umum legislatif di Sulawesi Selatan.

Memilih sikap golput merupakan bagian dari demokrasi, akan tetapi bukan sikap demokratis ketika seseorang atau sekelompok orang mengajak/menyerukan untuk memilih golput. Demokrasi yang baik adalah kedaulatan dikembalikan kepada person-person kedaulatan masyarakat, bukan karena titipan, atau karena pengaruh yang lahir dari luar. Sebagaimana dipahami bahwa makna demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat. rakyat dimaksudkan adalah person yang melakukan sikap untuk memilih atau tidak memilih.

Menurut Ahmad Nadir, (2005 : 32) *civil society* pada dasarnya mencerminkan hakikat demokrasi yang sesungguhnya, hanya saja proses

dan sistem demokrasi harus mencerminkan aspirasi rakyat. Paling tidak yang menjadi ukuran aspirasi rakyat adalah sebagaimana asas pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia (luber) jujur, dan adil (jurdil). Penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini adalah KPU, harus independent dan mengimplementasikan asas pemilihan umum.

Sebagai cara guna dalam pelaksanaan pemilihan umum mencerminkan independensi maka anggota KPU yang dilibatkan adalah warga Negara yang non porpol, kalangan akademis, dan *Non government Orgnization* (NGO).

Tidak heran jika muncul keinginan menempatkan kembali unsur partai politik dalam KPU, seperti digagas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Oleh Sidik Pramono (Kompas, Selasa, 11 Oktober 2005). Karena adanya kasus yang terungkap dikalangan internal Komsis Pemilihan Umum, pada proses pelaksanaan pemilihan umum.

Pada pemilihan umum seharusnya rakyat adalah subyek yang menentukan, bukan obyek yang ditentukan, baik dalam lingkup perpolitikan nasional maupun lokal. Masyarakat *pun* telah amat paham bahwa Indonesia bukan Negara kerajaan (monarkhi), tetapi negara modern yang mendasarkan sistem politiknya pada sistem demokrasi. Dalam konstitusi (Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945) ditegaskan, kedaulatan terletak ditangan rakyat, bahwa rakyatlah penentu segala-galanya sedangkan

pemerintah hanya sebagai pelaksana atas mandat dan tanggungjawab yang diamanahkan sesuai dengan keinginan rakyat.

Pemilihan umum sebagai momen demokrasi yang penting dan tepat dalam menyalurkan aspirasi. Demikian juga seluruh elemen masyarakat harus memberikan warna secara demokratis dalam memilih wakil-wakil rakyat di DPRD. Maka wakil-wakil rakyat harus sejalan dengan keinginan masyarakat konstituen. Demokrasi langsung yang seperti saat ini diharapkan maka masyarakat mengetahui program pemerintah yang akan diterapkan, tentunya adalah untuk kepentingan masyarakat. Tidak ada lagi program pemerintah di arahkan untuk kepentingan individu atau golongan tertentu,

Ironis adanya ketika sistem demokrasi langsung kemudian, kebijakan hanya dikeluarkan dan dilaksanakan untuk kepentingan penguasa (monarkhi), adalah suatu kemunduran. Dalam kemoderenan ini adalah tugas politik untuk menjawab kesemuanya. Tepat apa yang dikatakan Fukuyama, (2005 : 2)

Tugas politik modern adalah menjinakan kekuasaan negara, mengarahkan kegiatan-kegiatannya kearah tujuan-tujuan yang dianggap sah oleh rakyat yang dilayaninya, dan menjalankan kekuasaan di bawah aturan hukum.

Anggota KPU pasca lahirnya UU pemilihan umum No 12 Tahun 2003 bahwa untuk tidak secara bersamaan memegang jabatan apapun di dalam kepegawaian negeri (termasuk mengajar di Universitas negeri), jumlah anggota KPU adalah 11 untuk KPU Pusat (Nasional), dan masing –masing lima untuk anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

KPU merupakan lembaga yang bersifat Nasional, permanent dan independent, yang secara hirarkis diorganisir pada tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Independensi KPU adalah bebas dari pengaruh pihak manapun disertai dengan transparansi yang jelas dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berdasar pada asas pelaksanaan pemilihan umum oleh KPU yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Lembaga KPU selain kritik terhadap individu yang masuk dalam lembaga Komisi Pemilihan umum, juga tidak sedikit kita saksikan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja KPU yang seolah-olah terkooptasi dengan kepentingan politik, keberpihakan, ketidak terbukaan KPU. Atau jelasnya KPU kurang menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya pada pelaksanaan pemilihan umum.

Secara realistis, kritik, kontroversi dan penyimpangan yang terjadi baik dikalangan KPU dan di luar KPU pada rekrutmen anggota legislatif, persoalan partai politik, persoalan hak demokrasi masyarakat, keadilan dan keterbukaan masih nampak di beberapa kalangan masyarakat. Sehingga dapat diasumsikan bahwa demokrasi belum dilaksanakan secara baik dalam momen pemilihan umum.

Pada tesis ini diharapkan adanya gagasan-gagasan baru kiranya bermanfaat bagi upaya pelaksanaan pemilihan umum legislatif yang

demokratis dan berkedaulatan rakyat. dan dipergunakan oleh pihak-pihak pelaksana pemilihan umum, terkhusus yang berkecimpung dalam tugas dan wewenang pelaksanaan pemilihan umum yaitu komisi pemilihan umum. Juga diharapkan ditemukan gagasan pemikiran bagaimana masyarakat berperan dalam proses demokratisasi pada pemilihan umum, khususnya di Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, pelaksanaan pemilihan umum belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana harapan masyarakat, sebab masih ada kesenjangan *das sein* (pelaksanaan) dan *das sollen* (harapan).

Kesadaran pentingnya pelaksanaan pemilihan umum legislatif yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Pada pemilihan umum menjadi titik tolak perubahan negara Indonesia kearah yang lebih mapan demi terwujudnya adil dan kemakmuran. Hal ini dititik beratkan kepada lembaga KPU yang mengimplementasikan kewenangannya pada proses pelaksanaan pemilihan umum.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan pokok masalah yang akan dikaji kaitannya dengan implementasi wewenang KPU Provinsi dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif di Sulawesi Selatan Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wewenang KPU Provinsi dalam pendaftaran dan penetapan pemilih pada pemilihan umum legislatif di Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana pelaksanaan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pencalonan Anggota DPRD Provinsi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengungkapkan tentang implementasi kewenangan KPU Provinsi pada pendaftaran pemilih pada pemilihan umum legislatif di Sulawesi Selatan tahun 2004 secara demokratis dan berkedaulatan rakyat.
2. Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam proses pencalonan DPRD Provinsi pada pemilihan umum yang demokratis dan berkedaulatan rakyat

D. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan tersebut di atas, diharapkan hasil penelitian ini akan dapat memberikan manfaat serta kegunaan kepada berbagai pihak antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran konstruktif untuk memperkaya khasanah pemikiran dan

wawasan tentang pelaksanaan pemilihan umum legislatif di sulawesi selatan tahun 2004.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsi pada lembaga KPU, partai politik, pemerintahan, dan masyarkat secara umum dalam menjalankan pemilihan umum yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Wewenang

Menurut, Lubis (2002 : 56) Secara etimologis, istilah kewenangan berasal dari kata *wewenang*

Sedang menurut Bagir Manan (2000 : 1) istilah wewenang dengan kekuasaan *Macht* itu berbeda. Kekuasaan menurutnya hanya digambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan wewenang memiliki pengertian yang lebih luas meliputi hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).

Secara teoritik, mengenai kewenangan dapat dilihat pendapat H.D. Stout (Ridwan HR 2006 : 101) mengatakan

"Bevoegheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels betrekking heft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer" (wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum public"

Menurut F.P.C.L Tonnaer dalam Ridwan HR (2006 : 101);

"Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overheid en te scheppen" (kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga

Negara). Dalam Negara hukum, wewenang itu berasal dari peraturan pemerintah.

Menurut R.J.H.M. Huisman (Ridwan HR 2006 : 103)

“Een bestuursorgaan kan zich geen bevoegdheid toeëigenen. Slechts de wet kan bevoegdheden verlenen. De wetgever kan een bevoegdheid niet allen attribueren aan een bestuursorgaan, maar ook aan ambtenaren (bijvoorbeeld belastinginspecteurs, inspecteur voor het pachtkamer), of zelfs aan privaatrechtelijke rechtspersonen” (organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintah tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai {misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya} atau terhadap badan khusus {seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah}, atau bahkan terhadap badan hukum privat).

Pandangan yang melihat lebih jauh pada sisi tindakan yaitu ungkapan

P. Nicolai dalam Ridwan HR (2006 : 102)

“het vermoge tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolggericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of tenien gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of n ate laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handelign door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of te laten” (kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu {yaitu tindakan-tindakan yang dilakuakn untuk mengakibatkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum}. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tindakan melakukan tindakan tertentu, atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tetentu).

Sebagaimana diungkapkan F.A.M Stroink dan J.G. Steenbeek dalam

Ridwan HR (2006 : 101-102) meyebutkan sebagai inti Hukum Tata Negara

dan Hukum Administrasi bahwa *“het begrip bevoegdheid is dan ook een*

kernbegrip in het staats-en administratief recht” (kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban). Dalam hal ini dibagi atas dua cara organ pemerintah memperoleh wewenang, yaitu dengan cara atributif dan delegasi; bahwa atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain); jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi.

Menurut H.D Van Wijk Willem Konijnenbelt dalam Ridwan HR (2006 : 104) mendefinisikan:

1. *Attribustie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
2. *delegatief; overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursrgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintah lainnya).
3. *mandaat; een berstuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi etika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

Indroharto dalam Ridwan HR (2006 : 110) mengatakan wewenang dibagi atas 3 bagian,

- a. wewenang pemerintah yang bersifat terikat, yakni terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan atau peraturan dasarnya sedikit banyaknya menentukan tentang ini dari keputusan yang harus diambil.
- b. Wewenang fakultatif, terjadi dalam hal badan atau pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilih, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya.

- c. Wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada badan atau pejabat tata usaha Negara untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Dalam Pasal 22E (5) Undang Undang Dasar NRI 1945 Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ayat (6) bahwa ketentuan lebih lanjut tentang Pemilihan Umum diatur dengan undang-undang.

Sedangkan tugas dan kewenangan KPU Provinsi menurut Pasal 28 Undang-undang No 12 Tahun 2003 adalah

- a. merencanakan pemilihan umum di Provinsi;
- b. Melaksanakan Pemilihan umum di Provinsi;
- c. Menetapkan hasil pemilihan umum di Provinsi;
- d. Mengkoordinasi kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan KPU;

Dalam hal kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum adalah melaksanakan Pemilihan Umum di Provinsi, Sebagai penjelasan lebih lanjut sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 tentang tahapan, Program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004. disebutkan

Pertama, tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah Tahun 2004, selanjutnya disebut Tahapan, Program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2004.

Kedua, tahapan program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, meliputi:

1. Tahapan persiapan;
2. Tahapan pelaksanaan.

Ketiga, Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, meliputi kegiatan :

- a. Penataan organisasi Komisi Pemilihan Umum;
- b. Penyuluhan, sosialisasi dan rapat kerja;
- c. Pembangunan sistem informasi teknologi.

Keempat, Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, meliputi kegiatan :

1. Pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan;
2. Penelitian dan penetapan peserta Pemilu, terdiri dari :
  - a. Peserta pemilu dari partai politik, untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;

- b. Peserta pemilu dari perseorangan, untuk pemilihan umum anggota DPD;
- 3. Penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan anggota DPR dan DPRD;
- 4. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 5. Kampanye Pemilu;
- 6. Pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
  - a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan TPSLN;
  - b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
- 7. Penetapan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 8. Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 9. Pengucapan sumpah/janji keanggotaan :
  - a. DPRD Kabupaten/Kota;
  - b. DPRD Provinsi;
  - c. DPR dan DPD.

B. Konsep Demokrasi & Kedaulatan

1. Demokrasi

Istilah "demokrasi" berasal dari [Yunani Kuno](#) yang diterapkan di [Athena](#) kuno pada [abad ke-5 SM](#). Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak [abad ke-18](#), bersamaan dengan perkembangannya sistem "demokrasi" di banyak negara.

Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti [rakyat](#), dan *kratos/cratein* yang berarti [pemerintahan](#), sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 amandemen dicantumkan *kedaulatan berada di tangan rakyat*, sedangkan UUD 1945 sebelum perubahan menyebutkan *kedaulatan adalah di tangan rakyat*. Ini menegaskan bahwa Indonesia menetapkan prinsip pemerintahan oleh rakyat atau demokrasi.

Demokrasi yang pertama kali diterjemahkan oleh Socrates adalah demokrasi langsung. Di mana secara keseluruhan warga negara dengan nyata ikut serta dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum atau undang-undang. Pandangan realis demokrasi adalah akronium Yunani

yang paling absurd, bahwa bagaimana mungkin demos (rakyat) dan *Kratos* (otoritas/pemerintahan), atau sebutlah kekuasaan rakyat, bisa terwujud secara absolute dan kongkrit? sedangkan dalam pemilihan umum, yang diakui sebagai mekanisme paling modern untuk mengendalikan suara rakyatpun, sesungguhnya hanya mewakili sebagian dari keseluruhan.

Konsep demokrasi yang pertama kali dicetuskan oleh Socrates dalam Ahmad Nadir (2005 : 24) adalah pemilihan langsung namun demikian Plato justru kurang sepakat dan menganggap bahwa yang tepat adalah meritokrasi, bahwa masyarakat dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai keahlian yang tinggi dibidang yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga kekuasaan. Plato mengatakan bahwa demokrasi adalah bentuk terburuk dari sistem negara. Polemik tentang demokrasi tetap terjadi, namun sampai saat ini tetap dilaksanakan oleh beberapa negara terutama negara-negara modern.

Menurut Alfian (2005 : 8) bahwa demokrasi adalah seperangkat nilai, yang dimaksud nilai adalah demokrasi substantif, yaitu

- a. kedaulatan rakyat.
- b. Jaminan hak asasi manusia
- c. Pemilihan yang bebas dan jujur.
- d. Persamaan didepan hukum
- e. Proses hukum yang wajar
- f. Pluralisme social, ekonomi dan politik.
- g. Nilai-nilai toleransi, kerjasama dan mufakat
- h. Pemerintahan yang berdasarkan persetujuan dari yang diperintah
- i. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional
- j. Kekuasaan mayoritas yang menjamin hak-hak minoritas.
- k. *Check and balance* (Kontrol dan keseimbangan)

Pandangan tentang demokrasi tidak pernah lepas dari pada kedaulatan (kekuasaan) bahwa demokrasi kekuasaan ada ditangan rakyat, sebagaimana pengertian kekuasaan secara terpisah diberikan pengertian di bawah ini

2. Kedaulatan

Menurut C.S.T. Kansil (1983 : 7) bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayahnya dan segenap rakyat dalam negara itu. Kedaulatan juga adalah kekuasaan penuh untuk mengatur seluruh wilayah negara tanpa campur tangan dari pemerintah negara lain.

Beberapa teori kedaulatan yang terkenal, yaitu

1. Teori kedaulatan Tuhan (Theokrasi) adalah pemerintah/kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan.
2. Teori kedaulatan rakyat bahwa negara memperoleh kekuasaan dari rakyatnya dan bukan dari Tuhan atau raja.
3. Teori kedaulatan Negara bahwa adanya negara itu adalah kodrat alam, demikian kekuasaan tertinggi yang ada pada pemimpin Negara itu. Adapun kedaulatan itu sudah ada sejak lahirnya suatu Negara. Jadi jelaslah, bahwa Negara itu merupakan sumber daripada kedaulatan.
4. Teori kedaulatan hukum *supremacy of law* adalah kedaulatan bersumber dari hukum, yang berkedaulatan adalah hukum. Bahwa Hukum itu mengikat karena yang demikian dikehendaki oleh Negara yang menurut kodrat mempunyai kekuasaan mutlak.

Jimly Assidique (2005 : 142) bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada di tangan rakyat itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakekatnya berasal dari rakyat dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri. Sedangkan menurut J. Jacques Rousseau dalam

Jimly Assidique (2005 : 126) bahwa konsep kedaulatan itu bersifat kerakyatan dan atas kemauan umum (Volunte generale) rakyat yang menjelma menjadi perundang-undangan. Oleh sebab itu menurutnya konsep kedaulatan mempunyai sifat :

1. kesatuan (unite) bersifat monistis. (bahwa semangat rakyat dan kemauan umum rakyat itu adalah suatu kesatuan dimana mereka sebagai kesatuan berhak memerintah dan berhak untuk menolak diperintah.
2. bulat dan tak terbagi (indivisibilite) adalah rakyat adalah satu maka Negara juga adalah satu, maka kedaulatan itu juga bulat dan tak dapat dipecah-pecah.
3. tak dapat dialihkan (inalienabilite) adalah kekuasaan tidak mungkin diberikan pihak lain.
4. tidak dapat berubah (imprescriptibilite) kedaulatan adalah milik semua bangsa yang dimiliki secara turun temurun.

Menurut Jean Bodin dalam Jimly Assidique (2005 : 126) kedaulatan meliputi tiga unsur, yaitu

- a. kekuasaan itu bersifat tertinggi, tidak ada kekuasaan lebih tinggi dan asli dalam arti tidak berasal dari atau bersumber dari pada kekuasaan lain yang lebih tinggi.
- b. Mutlak dan sempurna dalam arti tidak terbatas dan tidak ada kekuasaan lain yang membatasinya.
- c. Utuh, bulat dan abadi dalam arti tidak terpecah-pecah dan tidak terbagi-bagi

Dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar.

C. Pemilihan Umum

Morissan (2005:17) pemilihan Umum (pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil sebagai perwujudan kedaulatan

rakyat. Pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Paling tidak ada tiga maca tujuan pemilihan umum, yaitu

1. memungkinkan peralihan pemerintahan secara aman dan tertib
2. untuk melaksanakan kedaulatan rakyat
3. dalam rangka melaksanakan hak asasi warga Negara.

Jadi pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat sebagai cirri dari negara demokrasi.

Dalam jurnal Afkar, Vol. IV. No.2, 1997 Abd Rohim Ghazali (1997:68) mengatakan bahwa ada tiga aspek yang harus diagendakan dalam menjadikan pemilu sebagai penunjang demokrasi adalah:

1. pada aspek filosofi konseptual, pemilih harus diberi makna dinamik.kontekstual dengan multiperspektif. Pemilu yang moNolik hanya akan menjadi bagian dari proses hegemonic makna yang memperbodoh masyarakat.
2. pada aspek legal konstitusional, undang-undang dan peraturan bagi pelaksanaan pemilu harus diubah, disesuaikan dengan aspek filosofi kontekstual.
3. pada aspek sosiokultur, setiap parpol harus diberikan kewenangan untuk mengeksoresikan dan melaksanakan program-programnya secara mandiri. Parpol bukan pengumpul suara legitimasi bagi pemerintahan yang sedang berjalan, namun merupakan instrument penggerak kearah demokrasi.

Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ayat (2) Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah. Ayat (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ayat (6) bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Berdasarkan konsederan Undang-undang No. 12 Tahun 2003, ditegaskan terhadap pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana dimatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada bagian b disebutkan pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

D. Legislatif

CF. Strong (2004:11) mengemukakan bahwa lembaga legislatif adalah kekuasaan pemerintah yang mengurus pembuatan hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan undang-undang (*Statutory Force*). Logikanya, pembuatan hukum selalu dilakukan sebelum pelaksanaan hukum tersebut.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

E. Komisi Pemilihan Umum

Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 mengatur bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan (meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu) dan bebas dari pengaruh pihak manapun disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU.

Komisi pemilihan umum Provinsi dan komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota merupakan bagian dari KPU yang melaksanakan pemilihan

umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tugas dan wewenang komisi pemilihan umum Provinsi, diatur dalam Pasal 28 undang undang No. 12 tahun 2004 bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi adalah

- a. merencanakan pelaksanaan pemilu di Provinsi
- b. melaksanakan pemilu di Provinsi
- c. menetapkan hasil pemilu di provinsi
- d. mengkoordinasi kegiatan KPU Kabupaten/Kota
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU.

sedangkan tugas komisi pemilihan umum Kabupate/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 31 tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota;

- a. Merencanakan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Kota
- b. Melaksanakan pemilu di Kabupaten/Kota
- c. Menetapkan hasil pemilu di Kabupaten/Kota
- d. Membentuk PPK,PPS,dan KPPS dalam wilayah kerjanya
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi.

Sebagai perbandingan lahirnya undang undang nomor 22 Tahun 2007 tentang penyeleggaraan pemilihan umum menyebutkan bahwa komisi pemilihan umum Privinsi dan komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota adalah disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan masing -masing tugas dan

wewenang adalah sebagaimana Pasal 9 undang undang Nomor 22 Tahun 2007 (1) Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- f. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;

- h. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU;
- i. Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
- j. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- k. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Provinsi;
- m. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;

- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang.

Sedangkan Pasal 10 (1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- m. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- n. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang

- mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
  - p. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
  - q. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

F. Sistem Pemilihan Di Indonesia

Menurut Andrew Reynolds dan Ben Reilly dalam buku terjemahan “Sistem Pemilu” yang diterbitkan kerjasama IDEA, United Nations, IFES Tahun 2002 Sistem pemilihan yang saat ini dipakai diseluruh dunia, dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar, yaitu

1. Sistem Pluralitas mayoritas adalah Pluralitas mayoritas karakter yang paling menonjol adalah bahwa sistem tersebut hampir selalu menerapkan sistrik tunggal,

Dalam kelompok sistem pluralitas mayoritas terbagi atas empat kelompok yaitu :

- a. *First Past the Post (FPTP)* dalam sistem ini dimaksudkan calon legislatif yang menang adalah yang mendapatkan suara terbanyak. Secara teoritis, seseorang caleg dapat dipilih dengan dua suara saja, jika caleg-caleg yang lain hanya mendapatkan satu suara.
  - b. *Blok Vote (BV)* dimaksudkan adalah para pemilih diberi kesempatan untuk memilih sebanyak kursi yang akan diisi, dan biasanya mereka bebas memilih caleg tanpa mempertimbangkan afiliasi partainya.
  - c. *Alternatif vote (AL)* dimaksudkan bahwa para pemilih dapat mengurutkan caleg sesuai dengan pilihan mereka, dengan memberi tanda “1” untuk caleg yang paling disukai, “2” untuk yang dibawahnya, “3” yang lebih rendah lagi, dst. Sistem pemilihan ini disebut “Preferential voting” (pemilihan berdasarkan preferensi). (Ben Reilly)
  - d. *Two Round System (TRS)* yaitu bukan sekali pilihan saja, akan tetapi dua putaran. Putaran pertama dilaksanakan sama seperti model FPTP jika seseorang caleg mendapatkan suara mayoritas absolut, maka mereka secara langsung terpilih, dan tidak diperlukan putaran kedua. Tetapi, jika tidak ada caleg yang mendapatkan mayoritas absolut, maka putaran kedua dilaksanakan, dan pemenang dari putaran ini dinyatakan terpilih. (Ben Reilly dan Andrew Reynolds)
2. Sistem Semi Proporsional merupakan sistem yang mengkonversi suara menjadi kursi dengan hasil yang berada di antara proporsionalitas sistem

perwakilan proporsional dengan mayoritarian dari sistem mayoritas-pluralitas.

Pada sistem pemilihan semi proporsional terbagi atas tiga komponen. yaitu

- a. *Single Non Transtroble Vote (SNTV)* yaitu setiap pemilih memilih satu suara, tetapi ada beberapa kursi yang harus diisi dalam distrik tersebut, dan caleg yang memperoleh suara terbanyak dapat mengisi kursi tersebut. (Andrew Reynolds)
  - b. *Sistem Paralel* (atau campuran) yaitu menggunkan baik daftar-daftar representasi proporsional maupun distrik-distrik mayoritas-pluralitas. “pemenang mengambil semuanya” (Andrew Reynolds)
  - c. *Limited Vote (LV)* yaitu sistem ini terletak antara SNTV dan Block Vote Karen dalam sistem ini ada sistrik wakil majemuk, dan para caleg yang menang semata-mata adalah mereka yang megumpulkan paling banyak suara. Para pemilih dapat memberikan suara yang jumlhanya lebih sedikit dari jumlah kursi yang diisi, tetapi lebih dari satu suara. (Andrew Reynolds)
3. Sistem Representasi Proporsional adalah sistem pemilihan yang sengaja mengurangi kesenjangan antara perlehan suara partai secara nasional dengan perolehan kursinya di parlemen.

Sistem representasi proporsional terdiri atas tiga kelompok,yaitu

- a. *Representasi Proporsional Drafter (RPD)* yaitu setiap partai yang menyajikan daftar nama caleg kepada pemilih, kemudian pemilih memilih satu partai; dan partai memperoleh suara sebanding dengan perolehan suara secara nasional. Para caleg yang menang diambil secara berurutan dari daftar tersebut.
- b. *Mixed Member Proportional (MMP)* yaitu apabila sebuah partai memenangkan sepuluh persen suara nasional tetapi tidak mendapatkan kursi berdasarkan sistem distrik, kemudian partai tersebut akan diberikan kursi yang seimbang dari daftar Representasi proporsional (RP), sehingga perwakilan mereka dalam perlemen menjadi sepuluh persen.

Single Transferable Vote (STV) yaitu menggunakan sistem majemuk, di mana pemilih mengurutkan caleg berdasarkan kesukaan (preferensi) mereka dalam kertas suara sama seperti yang dilakukan *Alternative vote*.

Morissan, (2005 : 220) bahwa; tata cara melaksanakan pemilihan umum pada dasarnya sangat ditentukan oleh bentuk lembaga perwakilan, partai politik yang ada, dan sistem politik pada suatu Negara.

Secara demokrasi sistem pemilihan umum adalah sesuai dengan keinginan masyarakat untuk menentukan pilihan atau berhak untuk mencalonkan diri, dan dalam pemilihan umum suara individu sangat diperhitungkan.

Menurut Morissan (2005 : 221) dikenal dua cara untuk mengisi kenggotaan lembaga perwakilan yaitu:

1. Melalui sistem pemilihan organis. Dalam sistem ini rakyat dianggap sebagai individu-individu yang bergabung dalam beberapa persekutuan-persekutuan hidup baik berdasarkan lapisan social, profesi maupun asal atau keturunan misalnya kelompok tani, guru buruh dan lain-lain. Dalam persekutuan ini memiliki hak politik untuk menunjuk akilnya di lembaga perwakilan sesuai dengan yang diminta oleh konstitusi atau undang-undang yang mengatur lembaga perwakilan tersebut.
2. Sistem pemilihan mekanis. Dalam sistem ini rakyat dianggap sebagai individu-individu yang berdiri sendiri, dimana satu orang adalah mempunyai satu suara. Pada sistem ini biasanya dikenal dua cara, yaitu
  - a. Sistem perwakilan distrik

Sistem pemilihan distrik atau disebut segai sistem mayoritas (single member constituency). Dalam sistem ini wilayah Negara dibagi-atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen untuk diperebutkan dalam suatu pemilihan umum.

- b. Sistem perwakilan proporsional

Sistem perwakilan proporsional atau disebut juga dengan sistem pemilihan berimbang (multy member constituency), dengan sistem ini kursi di parlemen pusat diperebutkan dalam satu pemilihan umum

sesuai dengan imbang suara yang diperoleh partai. Kelemahan sistem ini adalah calon-calon kurang dikenal oleh *constituent* karena wakil rakyat ditentukan oleh partai, sehingga program yang ditawarkan adalah program partai bukan program calon.

Sedangkan CF. Strong (2004 : 95-96) sistem pemilihan dibagi atas dua jenis sistem pemilihan; dari sudut pandang hak pilih atau hak suara dan kedua dari sudut pandang konstituensi (daerah pemilihan) atau jumlah pemilih, yaitu

1. Jenis Hak suara, pertama-tama, berkenaan dengan sistem pemilihan, negara-negara konstitusional kini dapat dibagi menjadi dua: Negara dengan pemilih dewasa berarti hak pilih hanya dimiliki semua orang dewasa baik pria maupun wanita dalam batasan umur tertentu, syarat-syarat yang sama dan tanpa persyaratan khusus, terlepas dari pencabutan hak suara karena melakukan tindakan kejahatan, hilang ingatan, dan sebagainya.
2. Jenis *konstituensi* (daerah pemilihan) bentuk konstituensi memberikan dasar pembedaan lebih lanjut dari sudut pandang sistem pemilihan di antara negara-negara konstitusional yang sudah ada.

Perbedaan ini terletak di antara negara-negara konstituensinya menghasilkan satu orang (atau paling banyak dua orang) dengan negara yang konstituenya menghasilkan beberapa anggota. Konstituen yang terakhir

ini umumnya dikaitkan dengan inovasi demokrasi yang dikenal sebagai perwakilan proporsional (proportional representation). Proporsional bertujuan untuk menjamin perwakilan kaum minoritas yang di tempat lain mungkin tidak memiliki suara dalam majelis terpilih.

Pada umumnya, sistem pemilihan dapat dilakukan pada dua cara yaitu melalui pengangkatan (penunjukan) yang biasa disebut dengan sistem pemilihan organis. Kedua, dengan cara pemilihan umum atau disebut dengan sistem pemilihan mekanis. Namun cara tersebut adalah tidak sama disemua negara, sebab tergantung dari negara masing-masing.

Menurut Wolhoff dalam Ni'matul Huda (2005 : 270) bahwa dalam sistem organisme, rakyat dipandang sebagai jumlah individu-individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka warna persekutuan hidup seperti geneologi (rumah tangga), territorial (desa, kota, daerah), fungsional spesial (cabang industri), lapisan-lapisan, dan sebagainya. Masyarakat dipandang sebagai suatu organisasi yang terdiri dari organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totaliter suatu organisasi, yaitu persekutuan-persekutuan hidup di atas. Peresekuatan inilah sebagai pengendali hak pilih, atau lebih tepat sebagai hak untuk mengutus wakil-wakil kepada perwakilan masyarakat (rakyat).

Lebih lanjut dikatakan Wolhoff bahwa rakyat dipandang sebagai massa individu-individu yang sama. Sistem pemilihan mekanis biasanya dilakukan pada dua sistem pemilihan umum, yaitu

- a. Sistem proporsional adalah suatu sistem pemilihan di mana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik (organisasi peserta pemilihan umum), sesuai dengan imbang perolehan suara yang didapat oleh partai politik/organisasi peserta pemilihan bersangkutan. Oleh karena itu sistem pemilihan ini disebut “sistem berimbang”
- b. Sistem pemilihan distrik adalah suatu sistem pemilihan yang wilayah negaranya dibagi atas distrik-distrik pemilihan, yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia di parlemen. Setiap distrik pemilihan hanya memilih satu orang wakil dari calon yang diajukan oleh masing-masing partai politik/organisasi peserta pemilihan umum. Oleh karena itu sistem pemilihan ini disebut *single-member constituency*. Pihak yang menjadi pemenangnya (calon terpilih) adalah yang memperoleh suara terbanyak (mayoritas) dalam distrik tersebut.

Sri Soemantri dalam Ni'matullah Huda (2005 : 271) menyebutkan bahwa jumlah kursi yang diperebutkan pada masing-masing daerah pemilihan lebih dari satu, karena itu sistem proporsional ini disebut dengan *multi member constituency*. Sisa suara dari masing-masing peserta pemilihan di daerah pemilihan tertentu tidak dapat lagi digabungkan dengan sisa suara di daerah pemilihan lainnya.

Untuk konteks Indonesia seringkali dicampur adukan antara *system electoral law* dengan *system electoral proses*. Dalam ilmu politik *electoral law* sebagaimana Douglas Rae dalam Ni'matullah (2005 : 274), menyatakan bahwa;

The electoral system is those which govern the processes by which electoral preferences are articulated as votes and by which these votes are translated into distribution of governmental authority (typically parliamentary seats) among the competing political parties. Artinya, sistem pemilihan dan aturan yang menata bagaimana pemilihan umum dijalankan serta distribusi hasil pemilihan umum. Sementara *electoral process* adalah mekanisme yang dijalankan di dalam pemilihan umum, seperti misalnya mekanisme penentuan calon, cara berkampanye, dan lain-lainnya.

Menurut Affan Gaffar dalam Ni'matullah (2005 : 275), sistem pemilihan *electoral law* tidak mempunyai sistem kepartaian di Indonesia. Sistem demokrasi juga disebut demokrasi procedural sebagaimana Eep Saepulloh Fatah (2005 : 8) mengatakan bahwa demokrasi procedural merupakan model sistem distrik (dengan berbagai variannya) ada juga dengan sistem proporsional (dengan berbagai variannya). Demikian pula atas sistem pemerintahan yang dipilih “apakah presidensial atau parlementer. Secara procedural, banyak pilihan yang dapat dikembangkan, yang penting tidak mengingkari aspek demokrasi substantial.

Kelompok minoritas, seperti agama dan etnis, jumlahnya cukup banyak. Pemisahan yang tajam antar kelompok minoritas atau mayoritas terdapat di sejumlah daerah. Dengan sistem pemilihan umum saat ini, khususnya untuk anggota DPRD, proporsional dengan daftar calon terbuka

memperhatikan hal ini karena sifatnya yang inklusif. Tetapi sifat inklusif itu masih akan tetap dipengaruhi oleh besar kecilnya suatu daerah pemilihan akan memiliki 3 (tiga) sampai 12 kursi perwakilan. Semakin banyak daerah yang mempunyai kursi sedikit, kearah 3 (tiga), akan semakin sedikit parpol yang terwakili di DPRD Provinsi, sebaliknya dengan semakin besar daerah pemilihan dengan lebih banyak kursi, akan ada peluang lebih luas untuk keterwakilan yang lebih luas pula. Artinya akan lebih bersifat eksklusif. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Thn 2003 bahwa "Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka "bahwa sistem proporsional secara relatif akan mendorong keterwakilan yang inklusif, adalah tergantung besarnya daerah pemilihan".

KERANGKA PIKIR

Landasan normatif pelaksanaan pemilihan umum adalah berdasarkan pada UUD NRI 1945, Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum. Dan keputusan keputusan KPU; Nomor 165.2 Tahun 2002, Nomor 67 Tahun 2003, Nomor 675 2003 , Nomor 23 Tahun 2004 , Nomor 434/KPU-SS/XII/2003, Nomor 100 Tahun 2004.

Komisi Pemilihan Umum dalam Pemilihan Umum Provinsi mempunyai kewenangan yaitu pelaksanaan Pemilihan Umum di Provinsi, pada kewenangan yang dimaksud adalah melakukan pencalonan anggota DPRD Provinsi

Bahwa kewenangan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur pada Pasal 28 poin b Undang-undang No. 12 Tahun 2004 menyebutkan yaitu melaksanakan Pemilihan Umum di Provinsi. Sebagai batasan kewenangan pemilihan tingkat Provinsi sebagai Ruang lingkup kewenangannya yaitu

Pertama, pendaftaran dan penetapan pemilih. Diantaranya; Pendataan Pemilih dan Penduduk Pelaksanaan (P4B) secara serentak, Penyampaian Kartu Pemilih oleh KPU Kab/Kota kepada pemilih melalui PPS, Penyampaian Daftar Pemilih Sementara yang disusun oleh BPS dan KPU Kabupaten /Kota kepada PPS untuk mendapatkan pengesahan, Penetapan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS. *Kedua*, pendaftaran calon anggota DPR Provinsi, diataranya Pengajuan calon oleh pengurus parpol, Penelitian calon anggota DPR Provinsi, *Ketiga* Penyampaian hasil penelitian kepada

partai politik peserta pemilu , *Keempat* Kesempatan untuk melengkapi / memperbaiki syarat calon anggota DPR Provinsi, *Kelima* Penetapan daftar calon anggota DPR Provinsi

Pada wewenang Komis Pemilihan Umum tersebut di atas pada Pemilihan Umum legislatif di Provinsi berjalan secara demokratis dan berkedaulatan rakyat.

Bagan Kerangka Pikir

Keterangan :

→ Garis Penghubung

E. Definisi Operasional

1. KPU Provinsi adalah lembaga yang bersifat tetap, dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilihan umum legislatif di KPU Provinsi
2. implementasi adalah pelaksanaan wewenang komisi pemilihan umum sesuai peraturan.
3. DPRD adalah lembaga legislatif yang berada di Sulawesi Selatan
4. Pemilihan umum adalah Pemilihan umum Legislatif di Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada Tahun 2004
5. Wewenang KPU Provinsi adalah melaksanakan Pemilihan Umum Legislatif di Provinsi,
6. Pendaftaran pemilih adalah pendaftaran pemilihan sampai pada penetapan jumlah pemilih tetap pada pemilihan umum legislatif di Sulawesi Selatan tahun 2004
7. Penetapan anggota DPRD adalah proses pencalonan sampai penetapan calon anggota DPRD Sulawesi Selatan ada pemilihan umum legislatif di Sulawesi Selatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Sosio legal riset mengingat penelitian ini adalah untuk menelaah implementasi wewenang KPU Provinsi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan, memaparkan secara lengkap, jelas dan sistematis sebuah penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, dengan sasaran anggota KPU Provinsi pada pelaksanaan pencalonan anggota DPRD Sulawesi selatan yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. KPU Kabupaten Bulukumba, KPU Kabupaten Bone, KPU Kabupaten Barru, masing-masing dengan anggota PPK, PPS, dan Masyarakat yang dianggap berkompeten dalam memberikan data yang diperlukan dalam penelitian. Pada pendaftaran pemilih yang demokratis dan berkedaulatan rakyat.

Penelitian ini rencana akan dilaksanakan selama selama 4 (empat) Bulan yaitu mulai Bulan Mei-Agustus 2007.

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Sulawesi Selatan,

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah KPU Kabupaten. Bone, KPU Kabupaten Bulukumba, dan KPU Kabupaten Barru.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan metode:

1. Kuesioner, yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden, pertanyaan-pertanyaan tersebut dibuat dalam bentuk berstruktur yang jawaban-jawabannya telah disediakan oleh peneliti.

2. wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk Tanya jawab secara lisan dengan responden.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dimaksudkan untuk mendeskripsikan kewenangan KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan pemilihan umum. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis presentase,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Singkat Pelaksanaan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Pemilihan Umum DPRD Sulawesi Selatan Tahun 2004

1. Pendaftaran Pemilih

Sebagaimana dalam Pasal 28 Point (b) UU No 12 Tahun 2003 mengatur bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi adalah melaksanakan Pemilu di Provinsi.

Sebagai acuan pelaksanaan pemilihan umum di Provinsi, maka dikeluarkan Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003 tentang tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah Tahun 2004, pada keputusan KPU secara teknis mengatur tentang tahap pelaksanaan pemilihan umum legislatif, yang dilaksanakan serentak dari DPR, DPRD Provinsi dan, DPRD Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan dimaksudkan adalah terdiri atas 2 tahapan, *pertama*, tahapan Persiapan. *Kedua*, Tahapan Pelaksanaan.

Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan-kegiatan, yaitu

- a. Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B)
- b. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan pendaftaran pemilih sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor. 165.2 Tahun 2002 tentang pelaksanaan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan.

Pasal 3 ayat (3) b Keputusan KPU Nomor. 165.2 Tahun 2002 bahwa perwakilan sekretaris Umum KPU Kabupaten/Kota mengkoordinasikan kegiatan pendaftaran pemilih dan pendaftaran penduduk berkelanjutan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota dan instansi Kabupaten/Kota yang menangani administrasi kependudukan. Dari Pasal 3 dimaksudkan bahwa pada penyampaian daftar pemilih sementara dilaksanakan oleh BPS dengan berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota.

Tahap pendataan dan pendaftaran pemilih adalah dilaksanakan oleh BPS, hasil data dan daftar pemilih sementara yang disusun oleh BPS maka diserahkan kepada Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk dilakuka *cross chec* ditingkat Kecamatan dan desa kelurahan oleh PPK dan PPS untuk mendapatkan pengesahan (pemilih tetap)

Pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B) merupakan rangkaian kegiatan pemilihan umum sekaligus tahapan

pertama dari tahapan pemilihan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 14 undang-undang No. 12 Tahun 2003 tahapan penyelenggaraan pemilu adalah rangkaian kegiatan pemilu yang di mulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, sampai pada pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pendaftaran pemilih dan penduduk berkelanjutan menjadi tugas komisi pemilihan umum namun pelaksanaanya bekerjasama dengan Departemen dalam negeri (Depdagri) dan Badan pusat statistik, BPS sebagai salah satu instansi yang terlibat dalam P4B dan sesuai dengan surat perjanjian bersama ketiga instansi tersebut, BPS mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pemilihan umum, petugas pendaftaran penduduk, dan mengelolah hasil pendaftaran. Sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 186 Tahun 2002 tentang jumlah badan penyelenggaraan pemilihan umum daerah, jumlah penduduk warga Negara Republik Indonesia dalam pemilihan umum Tahun 2004 dan Pasal 2 keputusan KPU nomor 165 tahun 2004 tentang pelaksanaan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 100 Tahun 2003 pada lampiran tahap penyelenggaraan dimaksudkan pada Point (P) yaitu Penyalpaian Kartu Pemilih oleh KPU Kab/Kota kepada pemilih melalui PPS.

Wewenang KPU Kabupaten Bulukumba, KPU Kabupaten Bone, dan KPU Kabupaten Barru sebagaimana dimaksudkan pada aturan tersebut di atas, guna mengetahui tingkat implementasinya pada masing –masing Kabupaten sebagaimana bagan I dibawah ini:

Bagan I. Implementasi wewenang KPU Daerah Kabupaten pada pendaftaran pemilih

Indikator wewenang	KRITERIA	RESPONDEN		
		KPU Bulukumba	KPU BONE	KPU BARRU
Pendaftaran pemilih	➤ Penyampai-an Daftar Pemilih Sementara : + oleh BPS dan KPU Kabupaten/ Kota	Terlaksana	terlaksana	Tdk Terlaksana
	➤ Penyampai-an Kartu Pemilih : + KPU Kab/Kota kepada PPK	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

Sumber : *adaptasi SK KPU Nomor 100/2002*

Mengukur implementasi wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yaitu

Pertama pada penyampaian daftar Pemilih sementara oleh BPS dan KPU, seharusnya KPU Daerah Kabupaten bekerja sama dan atau

berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Bahwa BPS melaporkan hasil pendataan yang selanjutnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan umum untuk dilakukan pengesahan menjadi daftar pemilih tetap, pada pemilihan legislatif di provinsi. Sebagaimana pada bagan I tersebut di atas maka KPU Kabupaten Bulukumba melaksanakan sesuai aturan, demikian KPU Kabupaten Bone juga melaksanakan kerjasama/koordinasi pada BPS Kabupaten pada pendaftaran pemilih. Lain halnya dengan KPU Kabupaten Barru tidak melaksanakan atau tidak melakukan kerjasama pada penyampaian daftar pemilih sementara kepada BPS. Maka dengan demikian KPU Barru adalah tidak melaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan

Kedua, penyampaian kartu pemilih KPU Kabupaten /Kota kepada PPS berdasarkan SK KPU Nomor 100/2002 dari 3 (tiga) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten; (Bulukumba, Bone, dan Barru) masing-masing melaksanakan penyampaian kartu pemilih kepada PPS pada pendaftaran Pemilih. Penyampaian kartu pemilih masing –masing Kabupaten tersebut melaksanakan sesuai aturan yang berlaku.

Sebagai hirarki penyampaian kartu pemilih dan penyampaian daftar Pemilih Sementara adalah dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPK' kepada PPS dapat dilihat implementasinya sebagaimana dijelaskan pada bagan II dan III dibawah ini.

Bagan II. Implementasi wewenang PPK Kabupaten
pada Pendaftaran Pemilih

Indikator wewenang	KRITERIA	RESPONDEN		
		PPK Bulukumba	PPK Bone	PPK Barru
Pendaftar-an pemilih	➤ Penyampaian Kartu Pemilih : PPK ke PPS,	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	➤ Penyampaian Daftar Pemilih Sementara : PPK kepada PPS	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

Sumber : *Adaptasi SK KPU Nomor 172 Tahun 2003*

Pada implementasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), terdiri atas 3 (tiga) responden PPK dari masing-masing 3 (tiga) Kabupaten (Bulukumba, Bone, dan Barru). Berdasarkan bagan di atas nampak bahwa masing-masing PPK menjalankan tugas pada penyampaian Kartu Pemilih dari PPK ke PPS,

Penyampaian Daftar Pemilih Sementara juga dilaksanakan secara maksimal oleh PPK kepada PPS. Sebagaimana dalam Pasal 4 (e) SK KPU Nomor 172 Tahun 2003 dimaksudkan bahwa: Membantu tugas-tugas KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilu.

KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dalam menyampaikan kartu Pemilih, dan penyampaian daftar pemilih sementara dibantu oleh PPK pada tingkat Kecamatan dan selanjutnya dibagi pada tingkat

Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana bagan di bawah ini;

Bagan III. Implementasi wewenang PPS Kabupaten pada pendaftaran

Indikator wewenang	KRITERIA	Wewenang		
		PPS Bulukumba	PPS Bone	PPS Barru
Pendaftaran Pemilih	1. Penyampaian Kartu Pemilih: PPS kepada Masyarakat	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	2. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara: dari PPK ke PPS untuk mendapatkan pengesahan.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	3. Penetapan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

Sumber: Adaptasi dari SK KPU Nomor 172 Tahun 2003 dan SK KPU Nomor 172 Tahun 2003

Sebagaimana bagan di atas pada penyampaian kartu pemilih, penyampaian daftar pemilihan sementara, dan penetapan daftar pemilih sementara yang dilakukan PPS, dengan 3 (tiga) orang sebagai responden dari anggota PPS dari masing-masing 3 (tiga) Kabupaten.

Pada penyampaian kartu pemilih dari PPS kepada masyarakat sebagaimana keterangan yang diperoleh dari 3 (tiga) tokoh masyarakat dari masing – masing dari 3 (tiga) Kabupaten pada kousioner yang berikan responden mengakui adanya penyampaian Kartu Pemilih dari PPS kepada masyarakat dengan mendatangi masing-masing rumah penduduk. Artinya bahwa pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan Kartu Pemilih, dan masyarakat tidak lagi diberatkan untuk mendatangi PPS, akan tetapi masyarakat diberikan pelayanan yang maksimal oleh PPS.

Penyampaian daftar Pemilihan sementara, dan penetapan daftar Pemilih Sementara yang dilakukan PPS tidak didapatkan adanya tugas PPS yang tidak terlaksana. Semua tugas yang diperoleh adalah diimplementasikan secara maksimal sebagaimana tugas PPS dalam Pada Pasal 5 Keputusan KPU Nomor 172 Tahun 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara. yaitu : PPS a. melakukan pendaftaran pemilih; c. mensahkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara. e. Mensahkan dan mengumumkan daftar pemilih tetap; dan n. membantu tugas PPK.

Perbandingan perolehan data antara Keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara

(TPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2004. Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2004 sebelum perubahan, dan data versi KPU Daerah Kabupaten (Bulukumba, Bone dan Barru) yang dijadikan pegangan dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif. dapat dilihat pada Tabel berikut ini;

Tabel 1. perbandingan versi data pemilih tetap Pada pemilihan legislatif di Sulawesi Selatan

No	Versi	Kabupaten	Jum. Kec	Jum.Pemilih	TPS
1.	Kep.No 16/2004	Bulukumba	10	250.443	1051
		Bone	27	453.443	1.656
		Barru	7	104.699	306
2.	Kep. No 23/2004	Bulukumba	0	250.443	1.051
		Bone	27	453.443	1.705
		Barru	7	106.346	418
3.	Kabupaten	Bulukumba	10	251.387	936
		Bone	27	450.812	1.712
		Barru	7	105.350	418

Sumber : *Kep. No.23 /2004 , Kep. 16/2004, dan acuan KPU Kabupaten*

Sebagaimana perbandingan data pada Tabel di atas, bahwa pada jumlah Kecamatan, jumlah pemilih tetap, dan jumlah TPS. mengalami perubahan yang signifikan. Bahwa seharusnya diperpegangi oleh KPU dalam melaksanakan pemilihan legislatif adalah Keputusan KPU No. 23 Tahun 2004. (perubahan keputusan KPU dari No. 16 Tahun 2004), akan tetapi pada pelaksanaannya KPU Bulukumba, Bone, dan Barru memiliki

data (versi) tersendiri, berbeda dengan keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2004. perbedaan dimaksudkan yaitu

Pertama, keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2004 mengalami kesalahan sebab dimaksudkan bahwa Kabupaten Bulukumba pada jumlah kecamatan menyebutkan 0 (nol) jumlah Kecamatan, sedangkan pada realitas menurut data versi KPU Daerah Bulukumba, dan hasil survey yang dilakukan bahwa jumlah kecamatan di Bulukumba pada tahun 2004 adalah 10 Kecamatan.

Sebelum perubahan keputusan, yaitu keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2004 sebelum perubahan menjadi keputusan Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2004. jumlah kecamatan di Bulukumba adalah 10 Kecamatan, berarti kesalahan jumlah kecamatan adalah ada pada keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2004, yang sesungguhnya keputusan tersebut adalah pedoman yang paten untuk pegangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2004.

Perbedaan data tersebut di atas KPU tidak memperhatikan keputusan sebelumnya yaitu nomor 16 tahun 2004 dan realitas jumlah kecamatan di Kabupaten Bulukumba.

Bahwa Jumlah pemilih tetap di Bulukumba, antara versi Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2004 dan Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2004 masing – masing menyebutkan 250.443 jumlah pemilih. Hanya saja yang terjadi kesalahan adalah pada data versi KPU Daerah Bulukumba menyebutkan 251.387 artinya ada selisih lebih, yaitu 944 jumlah pemilih tetap di Bulukumba. Maka terdapat kesalahan jumlah pemilih tetap di Kabupaten Bulukumba dalilnya adanya perbedaan perolehan jumlah pemilih tetap. Sedangkan Keputusan KPU Nomor 12 Tahun 2004 seharusnya menjadia pegangan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Sedangkan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) menurut Keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2004 di Bulukumba berjumlah 1.051 TPS, sedangkan yang terjadi di lapangan menurut versi KPU Bulukumba adalah berjumlah 936 TPS. Artinya terjadi pengurangan 115 TPS. Perbandingan data tersebut sangat ironis sebab, dilakukan penambahan jumlah pemilih sedangkan jumlah TPS dikurangi.

Kedua, Kabupaten Bone, yang mengalami kesalahan adalah terjadinya penambahan jumlah pemilih. Menurut Keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2004 jumlah pemilih tetap adalah 453.443 sedangkan versi KPU Bone adalah 450.812 jumlah pemilih. Artinya di Kabupaten Bone terjadi pengurangan yaitu 2631 jumlah pemilih.

Yang lebih ironis bahwa terjadi pengurangan jumlah pemilih sedangkan TPS dilakukan penambahan. Dalinya bahwa ssungguhnya,

menurut Keputusan KPU berjumlah 1705 jumlah pemilih sedangkan versi KPU Daerah Bone adalah 1712 TPS. maka yang terjadi adalah KPU Bone melakukan penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu 7 (tujuh) TPS. Dengan mengurangi jumlah pemilih.

Ketiga, Kabupaten Barru tidak mengalami perbedaan pada tingkat TPS, hanya saja pada tingkat jumlah pemilih adalah mengalami penurunan 996 pemilih, dari standar pelaksanaan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2004 yaitu 106.346 jumlah pemilih. Sedangkan versi KPU Barru adalah 105.350 jumlah pemilih.

Dari ketiga Kabupaten (Bulukumba, Bone, dan Barru) pada tingkat jumlah pemilih tidak menggunakan standar ideal pelaksanaan jumlah pemilih sebagaimana keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2004. Masing-masing KPU Kabupaten tersebut menggunakan versi tersendiri yang dijadikan acuan untuk jumlah pemilih. Pelaksanaan pemilihan umum Provinsi Sulawesi Selatan pada jumlah pemilih tetap, KPU Kabupaten Bulukumba, Bone, dan Barru mengalami kesalahan cukup signifikan dalam menentukan.

Mekanisme pendaftaran pemilih sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan, nampak bahwa KPU Daerah Kabupaten sampai pada PPS dilaksanaka dengan maksimal, asumsinya bahwa pada pendaftaran pemilih dilaksanakan sesuai dengan proses yang semestinya, yaitu

1. KPU melakukan kerjasama dengan BPS Daerah dalam memperoleh daftar pemilih sementara,
2. menyampaikan daftar pemilih sementara kepada KPU ke PPK, ke PPS
3. melakukan penetapan pemilih sementara oleh PPS

Tahapan selanjutnya adalah KPU Daerah melaksanakan ;

- a. Penyerahan kartu pemilih dari KPU kepada PPK
- b. PPK kepada PPS
- c. Dan dari PPS kepada masyarakat

Artinya bahwa KPU Daerah (Bulukumba, Bone, dan Barru) tidak mempunyai kesalahan dalam pendaftaran pemilih. Hanya saja KPU Daerah Kabupaten mempunyai data jumlah pemilih tersendiri, yang tidak berdasarkan pada Keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2004 sebagai standar ideal dalam pelaksanaan pendaftaran pemilih Tahun 2004 .

2. Pencalonan Anggota DPRD Sulawesi Selatan

Pasal 28 UU No. 12 Tahun 2003 menyebutkan bahwa Tugas dan Wewenang KPU Provinsi adalah; b. Melaksanakan Pemilu di Provinsi. Maka Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Keputusan Nomor 100 Tahun 2003 Tentang tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat

daerah Tahun 2004. *(sebagaimana Program/Kegiatan dan jadwal Komisi Pemilihan Umum terlampir pada lampiran I)*

Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2004 di Sulawesi Selatan, sebagaimana dalam Berita acara Nomor/59/KPU-SS/I/2004 tentang penetapan calon legislatif tetap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bahwa calon legislatif berdasarkan daerah pemilihan masing-masing

Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Legislatif dibagi atas VIII (delapan) Daerah Pemilihan (DP) yaitu:

1. Daerah Pemilihan I (Makassar),
2. Daerah Pemilihan II (Gowa, Takalar, dan Jeneponto).
3. Daerah Pemilihan III (Bantaeng, Bulukumba, Selayar, dan Sinjai).
4. Daerah Pemilihan IV (Maros, Pangkep, Barru, dan Pare-Pare).
5. Daerah Pemilihan V (Bone, Soppeng, dan Wajo).
6. Daerah Pemilihan VI (Pinrang, Sidrap, Enrekang, dan Tator).
7. Daerah Pemilihan VII (Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara, Majene, dan Polewali).
8. Daerah Pemilihan VIII (Palopo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur).

Jumlah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2004 berjumlah 28 Kabupaten/Kota, yakni Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Sinjai, Maros, Pangkep, Barru, Pare-Pare, Bone, Soppeng, Wajo, Pinrang, Sidrap, Enrekang,

Tator, Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara, Majene, Polewali, Palopo, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur.

Jumlah Penduduk di Sulawesi Selatan berdasarkan data pemilihan Tahun 2004 berjumlah: 8.242.375 jiwa dengan jumlah pemilih sebanyak: 5.491.378 jiwa dengan 75 (tujuh Puluh Lima) DPRD Sulawesi Selatan yang diperebutkan. Sedangkan Jumlah partai politik yang ikut Pemilihan Umum Legislatif di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2004 berjumlah 24 berdasarkan nomor urut (*nama dan urutan Partai Politik lihat Lampiran II*)

Calon legislatif provinsi yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu di Sulawesi Selatan keseluruhan berjumlah 1.219 anggota, sedangkan yang tidak memenuhi syarat 1.128 anggota. Jumlah calon Perempuan adalah 329 anggota dan laki-laki 799 anggota.

Partai politik yang tidak memperhatikan kuota 30% Perempuan pada tiap daerah pemilihan tidak akan diikutkan sebagai peserta pemilihan umum Legislatif. sebagaimana di tegaskan pada Pasal 65 (1) Undang undang No. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum bahwa Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%..

Akan tetapi kata “memperhatikan” disini bukan berarti mutlak harus ada keterwakilan perempuan, sebab tentu harus mengacu pada syarat calon anggota DPRD, sehingga dimungkinkan dalam suatu daerah Pemiliha (DP) terdapat partai yang tidak dapat merekrut perempuan untuk dicalonkan karena factor tidak adanya yang dapat memenuhi syarat calon anggota DPRD sebagaimana syarat anggota DPRD sebagaimana dalam Pasal 60 Undang undang No, 12 Tahun 2003 bahwa Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang

terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya;

- h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten; dan terdaftar sebagai pemilih.

Tabel 1: Kuota 30 % Perempuan pada pemilihan legislatif tahun 2004

No	Nama partai	Wilayah (Daerah Pemilihan) Keterwakilan 30% Perempuan							
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	PNI marhaenis	0%		0%		0%		0%	0%
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat		0%	0%	2%	0%		0%	0%
3.	Partai Bulan Bintang		14%		0%	0%	20%	0%	
4.	Partai Merdeka			20%		25%		20%	25%
5.	PPP					29%			0%
6.	Partai PDK		17%					20%	
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru							29%	
8.	Partai Nasional Banteng				0%			29%	

	Kemerdekaan								
9.	Partai Demokrat		20%		25%	25%		20%	
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia		20%	0%	25%	25%		0%	
11.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia				0%		0%	0%	
12.	Partai Persatuan Nahdatul Ulama Indonesi			0%				20%	
13.	PAN	29%			0%		0%		29%
14.	PKPB		25%		14%		25%	29%	25%
15.	Partai Kebangkitan Bangsa		20%		0%		0%	0%	0%
16.	PKS	25%						29%	
17.	Parta Bintang Reformasi	14%	29%	17%				20%	11%
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	20%		20%			18%	10%	20%
19.	Partai Damai Sejahtera			0%				29%	
20.	Partai Golongan Karya	17%	8%	10%	22%	14%	15%	10%	20%
21.	Partai Patriot Pancasila			25%	0%		25%	14%	0%
22.	Partai Sarikat Indonesia		29%			25%	20%		
23.	Partai Persatuan Daerah	0%						0%	
24.	Partai Pelopor	20%	20%	0%				14%	

Sebagaimana bagan tersebut di atas, yang ironis bahwa Partai Golongan Karya (Golkar) merupakan partai terbesar dan namun di Sulawesi Selatan dari 8 (delapan) Daerah Pemilihan tidak ada satupun yang memenuhi kuota 30% Perempuan. Sungguh

memprihatinkan sebab partai Golkar termasuk partai yang cukup lama melakukan perkaderan. ini berarti partai tersebut tidak memperhatikan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Sebagai indikator Partai Golkar, kurang perhatian terhadap keterwakilan Perempuan adalah pada penempatan nomor yang tertinggi adalah nomor urut 4 (empat) dari Daerah Pemilihan IV dan VII, sedangkan yang lainnya nomor urut 5 (lima) daerah Pemilihan I, nomor urut 12 dari daerah Pemilihan II, nomor urut sembilan dari wilayah III, nomor urut 10 dari daerah pemilihan V, nomor urut 12 dari wilayah VI, dan nomor urut 8 (delapan) dari daerah Pemilihan VIII.

Sedangkan Partai Perhimpunan Indonesia Baru merupakan Partai Kecil dan merupakan partai yang sangat tinggi keterwakilan perempuan sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Sebab dari VIII Daerah Pemilihan hanya daerah Pemilihan VII (Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara, Majene, dan Polewali) yang tidak memenuhi keterwakilan Perempuan 30%.

Dari VII Daerah Pemilihan, secara akumulasi 24 Partai Politik, daerah Pemilihan VII yaitu mamasa, Mamuju, Mamuju utara, Majene, dan Polewali) merupakan daerah yang sangat kurang keterwakilan Perempuan. Sedangkan Daerah Pemilihan I (makassar) merupakan

daerah Pemilihan terbanyak keterwakilan Perempuan sebagai Calon Anggota DPRD Sulawesi Selatan. VIII Daerah Pemilihan dari 24 Partai tidak ada satupun partai yang memenuhi keterwakilan perempuan.

Berdasarkan laporan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Daftar calon anggota legislatif Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2004, yang bermasalah berdasarkan jenis pelanggaran sebagaimana table di bawah ini

Tabel 2 : Daftar caleg bermasalah Provinsi Sulawesi selatan tahun 2004

No urut	Nama partai	Jumlah dan Jenis pelanggaran			
		Tidak ada berkas	PNS	Ijazah palsu	Pengunduran diri
2.	Partai Buruh social demokrat	8	-	-	-
3.	Partai Bulan Bintang	5	-	-	-
4.	Partai Merdeka	1	-	-	-
9.	Partai Demokrat	-	-	1	-
10.	Partai keadilan dan persatuan Indonesia	-	-	3	2
13.	Partai Amanah Nasional	4	1	-	2
14.	Partai Karya peduli bangsa	2	-	-	-
15.	Partai kebangkitan bangsa	19	-	-	-
16.	Partai keadilan Sejahtera	2	-	-	1
18.	Partai demokrasi Indonesia perjuangan	5	-	-	1
19.	Partai damai sejahtera	2	-	-	-
21.	Partai Patriot Panasila	9	-	-	-
22.	Partai serikat	7	-	-	-

	Indonesia				
23.	Partai persatuan daerah	7	-	1	-
24.	Partai Pelopor	7	-	-	1
	Jumlah	58	1	5	7

Sumber: buku laporan KPU Provinsi Sulawesi Selatan

Sedangkan Berdasarkan laporan pengawasn Panwaslu Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2004 jenis tindak pidana pemilihan umum, sebagaimana tabel berikut di bawah

Tabel 3 Uraian tindak pidana pemilu legislatif Tahun 2004

No	Jenis tindak pidana pemilu	Jumlah putusan	putusan terbukti	Putusan bebas	keterangan
1	Ijazah palsu	83 Kasus	Terbukti	1 Kasus	Sembilan kasus ijazah palsu masih dalam proses pengadilan tinggi diantaranya satu caleg DPRD Provinsi dan delapan caleg DPRD Kabupaten
2	Money politik	6 Kasus	5 Kasus	1 Kasus	
3	Curi star	9 Kasus	4 Kasus	5 Kasus	
4	Penghinaan parpol	1 Kasus	Terbukti	-	
5	Penggelembungan suara	5 Kasus	Terbukti	-	
6	Pencoblosan dua kali	1 Kasus	Terbukti	-	

Sumber: Laporan Panwas Sul-sel Tahun 2004

Perbandingan antara 2 dan 3 tersebut di atas menggambarkan bahwa terdapat perbedaan data pelanggaran daftar calon anggota

legislatif. Bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan penggunaan ijasah palsu hanya terdiri atas 5 orang, sedangkan temuan Panitia pengawas pemilihan umum yang menggunakan ijasah palsu adalah terbukti 85 orang dan hanya satu putusan bebas. Dari data tersebut ternyata KPU Provinsi Sulawesi Selatan bekerja kurang maksimal. Kekurangan lain yang terdapat pada KPU Provinsi adalah tidak adanya transparansi pada daftar calon yang terbukti melakukan pelanggaran. Sebagaimana pada daftar calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang bermasalah tidak semua ada dalam laporan KPU Provinsi, hanya sebagian partai politik yang di muat dalam buku laporan KPU Provinsi tahun 2004.

Adapun nama-nama partai politik yang tidak dimasukkan dalam daftar partai/calon yang bermasalah yaitu; partai persatuan pembangunan, partai persatuan demokrasi kebangsaan, partai perhimpunan indonesia baru, partai nasional banteng kemerdekaan, partai penegak demokrasi indonesia, partai persatuan nahdatul ulama indonesia, partai bintang reformasi, partai golongan karya, dan partai patriot pancasila.

Sedangkan jumlah laporan dan temuan Panwaslu pada pemilihan umum legislatif tahun 2004 terhitung mulai Juni 2003 s/d September 2004, di gambarkan pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 4 : jumlah laporan dan temuan Panwaslu pemilu legislatif 2004

Peng. pemilu	laporan dan temuan	Diselesaikan					Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8
Panwaslu provinsi dan panwaslu Kab.	1554	Pelag. pidana	Pelang. administrasi ke KPU	Sengketa di selesaikan Panwaslu	Dikirim ke instansi lain	Jml	
Jumlah		105	775	139	6	1025	529

Sumber : Panwas Laporan Panwas legislatif 2004

Sedangkan hanya 11 partai politik masing-masing dengan perolehan kursi, yang lolos legislatif di Sulawesi Selatan sebagaimana bangan dibawah ini.

Tabel 6. Partai Politik yang lolos dan Jumlah kursi pada legislatif di Sulawesi Selatan Tahun 2004

Nomor	No. Urut	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	16	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8
2	6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	8
3	5	Partai Persatuan Pembangunan	7
4	17	Partai Bintang Reformasi	1
5	19	Partai Damai Sejahtera	1
6	4	Partai Merdeka	1
7	9	Partai Demokrat	1
8	18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	6
9	3	Partai Bulan Bintang	1
10	13	Partai Amanah Nasional	8
11	20	Partai Golongan Karya	33
Total Kursi DPRD Sul-Sel			75 Kursi

Sumber; *KPU Provinsi Sulawesi Selatan*

Dari 75 Kursi DPRD Sulawesi Selatan dan 11 Partai Politik, jumlah Perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif terdiri atas 5 (lima) masing-masing dari daerah pemilihan III berjumlah satu Orang, Daerah Pemilihan VI dua orang, Daerah Pemilihan V satu orang anggota, dan 70 laki-laki, yang tersebar di tiap daerah pemilihan, dari VIII Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas 5 (lima) anggota berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 159 Tahun 2003 tentang pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 174 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan. Serta *Job description* masing-masing anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 193/KPU-SS/VIII/2003 Tentang Pembentukan Divisi Pembidangan Tugas Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditetapkan di Makassar pada tanggal 5 Agustus 2003, Nama-Nama anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (*Lihat Lampiran III*)

A. Mekanisme Pembentukan Panitia Pendaftaran dan Penelitian Calon Anggota DPRD

Pada pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk Panitia pendaftaran dan penelitian calon anggota DPRD

Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana Keputusan KPU Provinsi Nomor: 434/KPU-SS/XII/2003.

Sebagai bahan analitis guna mengetahui mekanisme pembentukan panitia pendaftaran dan penelitian pencalonan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana bagan dibawah ini

Bagan I. Mekanisme pembentukan Tim Kelompok Kerja

Indikator wewenang	KRITERIA	Implementasi
Pencalon-an Anggota DPRD Provinsi;	mekanisme pembentukan Panitia pendaftaran dan penelitian calon DPRD Sul-Sel	“Mekanisme pembentukan kelompok kerja (pokja) penelitian syarat anggota DPRD Provinsi adalah 1) sebelumnya nama calon Pokja diusulkan dari Bagian Program kepada sekertaris KPU Provinsi untuk diajukan kepada ketua untuk ditanda tangani” 2) ditentukan dalam rapat pembentukan tim pokja”,

Sumber: Adaptasi dari SK KPU Provinsi Nomor: 434/KPU-SS/XII/2003.

Berdasarkan bagan di atas bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan wewenangnya dalam membentuk Panitia Pendaftaran dan Penelitian calon anggota DPRD Sulawesi Selatan dengan mekanisme sebagaimana Ridwan J. Silamma (hasil wawancara tanggal 5 Juni 2007) bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan membentuk Tim

Kelompok Kerja. Adapun tahap mekanisme pembentukan TIM kelompok kerja penelitian syarat calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan , yaitu

Pertama, nama-nama calon tim kelompok kerja (Tim Pokja) di usulkan oleh bagian Program KPU Provinsi. Bahwa hak bagian Program KPU Provinsi untuk menentukan nama-nama Tim Pokja, selanjutnya di teruskan kepada sekretaris KPU Provinsi.

Kedua, Sekretaris KPU Provinsi melakukan pemeriksaan nama-nama Tim Pokja dari Bagian Program yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua KPU.

Ketiga, ketua KPU melakukan pemeriksaan nama-nama Tim Pokja disetujui oleh sekretaris KPU Provinsi untuk ditetapkan.

Mencermati mekanisme penetapan Tim Pokja tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum melaksanakan sebagaimana dengan aturan dan secara demokratis, dalilnya bahwa anggota Tim Pokja di bentuk dan diusulkan mulai dari Bagian Program KPU Provinsi sampai pada penetapan yang dilakukan melalui rapat penetapan Tim Pokja Penelitian Calon Anggota DPRD. Sehingga pengambilan anggota Tim Pokja terkesan tidak tertutup hanya keinginan anggota KPU Povinsi semata.

Hal tersebut sebagai legitimasi pembentukan panitia dan sekretaris pendaftaran dan penelitian calon anggota DPRD Provinsi

Pemilu 2004 Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan nomor: 434/KPU-SS/XII/2003 sebagaimana nama terlampir (*lihat SK lampiran IV*)

Demikian juga sebelum pendaftaran calon Anggota DPRD maka harus mempunyai partai politik yang lolos untuk mengikuti Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum dalam verifikasi partai politik juga membentuk tim Kelompok Kerja sebagaimana keputusan KPU Provinsi Nomor: 237/KPU-SS/IX/2003. Tentang Pembentukan Panitia Pendaftaran Penelitian dan Penetapan Partai Politik sebagai peserta Pemilihan Umum 2004 Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada keputusan tersebut dicantumkan 6 (enam) nama Koordinator, penanggung jawab dan sekretaris dan pendamping sebanyak 10 orang. Personalia TIM Kelompok kerja Panitia Pendaftaran, Penelitian dan penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu 2004, yaitu (*lihat Lampiran SK, pada lampiran V*)

Proses pendaftaran peserta pemilihan umum 2004 dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam keputusan KPU Nomor 105 Tahun 2003 tentang tata cara penelitian dan penetapan partai politik menjadi peserta pemilu dan keputusan KPU Nomor 615 tahun 2003 tentang tata cara penelitian dan penetapan partai politik yang bermaksud mengikuti pemilihan umum 2004, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan sebagai partai politik

berbadan hukum yang ditetapkan oleh departemen kehakiman dan HAM.

Berdasarkan laporan pengawasan panwaslu Provinsi Sulawesi Selatan tentang anggota DPR, DPRD, Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2004, potensi pelanggaran, yaitu

- a. pendaftaran partai politik tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh KPU
- b. partai politik tidak mempunyai kantor tetap
- c. politik uang, menyogok petugas verifikasi
- d. kekerasan dan keributan

sedangkan masalah –masalah dilapangan, yaitu

1. Kurangnya respon partai politik memberikan data tentang kepengurusan partai politik
2. KPU Provinsi tidak melibatkan instansi terkait dalam proses verifikasi
3. KPU Provinsi tidak menyampaikan hasil verifikasi factual pada panitia pengawas pemilihan umum.

B. Penelitian Calon Anggota DPR Provinsi

Bagan II. Implementasi Wewenang KPU Provinsi menurut undang-undang

Indikator wewenang	KRITERIA	Implementasi
Pencalonan	tugas	Tugas kelompok kerja “

Anggota DPRD Propinsi;	kelompok kerja	1). meneliti berkas kelengkapan calon peserta 2). kalo terjadi kekurangan maka dikembalikan kepada Partai Politik bersangkutan untuk dilengkapi

Sumber: *Adaptasi dari Keputusan KPU Provinsi Nomor: 434/KPU-SS/XII/2003.*

Pada pencalonan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan maka dalam dibentuk Panitia Pendaftaran dan Penelitian calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi. Sebagaimana keputusan KPU Provinsi Nomor: 434/KPU-SS/XII/2003.

Adapun tugas Panitia dan Sekertaris Pendaftaran dan Penelitian Calon Anggota DPRD Provinsi Pemilu 2004 Provinsi Sulawesi Selatan, menurut SK KPU Provinsi Nomor: 434/KPU-SS/XII/2003, yaitu

- a. Membagikan Formulir Kepada Partai Politik
- b. Meneliti berkas Kelengkapan Administrasi calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
- c. Memberikan Penjelasan/Sosialisasi tentang tatacara pengisian formulir kepada Partai Politik peserta Pemilu 2004
- d. Mengkoordinasikan Kegiatan pendaftaran dan penelitian pada Parpol sebagai peserta Pemilu 2004
- e. Meneliti ulang berkas Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan apabila terdapat kekurangan berkas

- f. Membuat laporan hasil kerja panitia pendaftaran dan penelitian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kepada KPU.

C. Penyampaian Hasil Penelitian Kepada Partai Politik Peserta Pemilu

Bagan III. Wewenang KPU menurut Partai Politik

Indikator wewenang	KRITERIA	Partai Politik		KPU Provinsi	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
Pencalonan Anggota DPRD Propinsi;	1. penggunaan formulir pencalonan	√		√	
	2. kelengkapan surat pernyataan sikap	√			√
	3. umpan balik verifikasi berkas pencalonan	√		√	
	4. transparansi hasil verifikasi berkas pencalonan	√		√	
	5. kesempatan perbaikan syarat pencalonan	√		√	
	6. keikutsertaan Parpol dalam penetapan calon anggota DPRD	√		√	

Sumber: adaptasi dari Keputusan KPU Nomor 675 Tahun 2003

Pada pencalonan anggota DPRD Provinsi sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 675 Tahun 2003

Pertama Pasal 10 bahwa : (1) pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah

pemilihan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9, dilaksanakan secara tertulis dengan menggunakan formulir surat pencalonan yang ditetapkan.

Kedua, Pasal 12 (2) a. surat pernyataan kesediaan menjadi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya serta dibubuhi cap dengan menggunakan formulir yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 68 Undang – Undang No 12 Tahun 2003 menyebutkan bahwa partai politik peserta pemilu yang mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, wajib menyerahkan; surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, .

Ketiga, adanya umpan balik antara KPU dan Partai Politik pada pencalonan Anggota DPRD Provinsi, sebagaimana keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 675 Tahun 2003 pada Pasal 23 bahwa apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 22, terdapat surat pernyataan dan atau surat keterangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya.

Keempat, pada Pasal 28 mengenai verifikasi dan kesempatan memperbaiki syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 bahwa dalam hal terdapat calon yang ditolak karena tidak memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 21 dan Pasal 22, penolakannya diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan partai politik sesuai tingkatannya untuk diberi kesempatan melengkapi dan/atau memperbaiki syarat calon atau mengajukan calon lain.

Kelima, keikutsertaan partai politik pada penetapan calon anggota DPRD Provinsi sebagaimana diatur pada Pasal 34 (2) penetapan dan penandatanganan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan pada Ayat (1), dilaksanakan pada rapat Pleno KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan dihadiri oleh pimpinan partai politik sesuai tingkatannya yang mengajukan calon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota serta undangan yang dianggap perlu

Syamsari dari Partai Keadilan Sejahtera saat diminta keterangan tanggal 11 Juni 2007 bahwa

“Partai Keadilan Sejahtera menerima berkas formulir, pada pencalonan anggota DPRD juga melengkapi dengan kelengkapan surat pernyataan sikap”,

Hasil verifikasi calon yang dilaksanakan oleh KPU diberikan kepada partai politik, dan ketika terjadi kesalahan dalam syarat pencalonan maka KPU memberikan kesempatan kepada partai politik untuk diperbaiki dalam jangka waktu sebagaimana termaktub dalam surat dari KPU kepada Partai Politik.

Demikian juga pada partai politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP). KPU Provinsi Sulawesi Selatan memberitahukan kepada Partai Politik tentang hasil penelitian (Perbaikan). Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berdasarkan isi surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 384/KPU-SS/XII/2003 yang ditandatangani oleh M. Darwis (Ketua Tim Pelaksana Penelitian Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan) pemberitahuaa/Penyampaian kepada Partai Politik PPP yang dimaksud yaitu;

- a. Agar segera melengkapi dan/atau memperbaiki kekurangan untuk disampaikan kepada kami selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan perbaikan diterima berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 675 Tahun 2003 Pasal 29 ayat 1.
- b. Calon anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berkedudukan sebagai PNS atau anggota TNI/Polri, harus mengundurkan diri sebagai PNS atau anggota TNI/Polri yang

dibuktikan dengan Surat persetujuan pengunduran diri dari pimpinan instansi yang mengangkatnya.

- b. Keterwakilan perempuan agar sungguh-sungguh memperhatikan sekurang-kurangnya 30% (tiga Puluh Persen) sebagaimana termaktub.

C. Pelaksanaan wewenang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten pada pendaftaran pemilih.

1. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Sulawesi Selatan

Pasal 28 Point b. UU No. 12 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah melaksanakan Pemilihan Umum di Provinsi, Sebagai penjelasan pada Pasal tersebut KPU menerbitkan SK Nomor 100 tentang Tahap penyelenggaraan Pemilihan Umum anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Yang terdiri atas dua tahap yaitu *tahap persiapan* dan *tahap pelaksanaan*..

Pencalonan anggota DPRD adalah dilaksanakan pada tingkat KPU Provinsi. Maka KPU Provinsi Sulawesi Selatan membentuk Panitia Pendaftaran dan Penelitian sebagaimana Ridwan J.S KPU (wawancara tanggal 5 Juni 2007) bahwa mekanisme Pembentukan Panitia Pendaftaran dan Penelitian syarat anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah ditentukan dalam rapat pembentukan tim Pokja, nama-nama calon Tim Pokja diusulkan dari Bagian Program

KPU kepada sekretaris KPU dan diajukan kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk di tanda tangani

Lebih lanjut, bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan membentuk panitia pendaftaran dan penelitian. Adapun tahap mekanisme pembentukan Panitia Pendaftaran dan Penelitian syarat calon anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan , yaitu

Pertama, nama-nama calon Panitia pendaftaran dan penelitian di usulkan oleh bagian Program KPU Propinsi. Bahwa hak bagian Program KPU Provinsi untuk menentukan nama-nama Panitia Pendaftaran dan penelitian, selanjutnya di teruskan kepada sekretaris KPU Provinsi.

Kedua, Sekretaris KPU Provinsi melakukan pemeriksaan nama-nama calon Panitia Pendaftaran dan Penelitian dari Bagian Program yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua KPU.

Ketiga, ketua KPU melakukan pemeriksaan nama-nama Panitia Pendaftaran dan Penelitian yang didisposisi oleh sekretaris KPU Provinsi untuk ditetapkan.

Mekanisme pembentukan Panitia pendaftaran dan penelitian calon anggota DPRD Sulawesi Selatan Tahun 2004 berdasarkan wawancara nampak KPU Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan dengan maksimal, dalilnya bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan

menerbitkan SK KPU Provinsi Nomor: 434/KPU-SS/XII/2003. Tentang Pembentukan Panitia dan Sekertaris Pendaftaran dan Penelitian Calon Anggota DPRD Provinsi Pemilu 2004 Provinsi Sulawesi Selatan

Hanya saja keputusan KPU Provinsi Nomor: 434/KPU-SS/XII/2003. yang mempunyai tugas pendaftaran dan penelitian adalah Panitia, sedangkan responden anggota KPU Provinsi menyebutkan Tim Kelompok Kerja. Antara “Panitia” dan “Tim Pokja” tentunya mempunyai perbedaan makna sehingga memungkinkan terjadinya multiinterpretasi pada pelaksanaan di lapangan karena tidak.

Tugas dan Panitia pendaftaran dan dan penelitian calon anggota DPRD Sulawesi Selatan sebagaimana Ridwan J.S bahwa *Pertama* meneliti berkas kelengkapan calon peserta *Kedua*, ketika terjadi kekurangan maka dikembalikan kepada Partai Politik bersangkutan.

Beberapa kesalahan yang terjadi pada proses pencalonan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagaimana diungkapkan Farid (panitia Pendaftaran dan penelitian calon anggota DPRD) berdasarkan hasil wawancara 5 Juni 2007) bahwa terdapat calon anggota DPRD yang menggunakan ijazah tidak dibubuhi *stample* oleh instansi terkait, adanya ijazah yang tidak dilegalisir dari sekolah bersangkutan atau oleh instansi terkait.

Demikian juga dengan adanya anggota partai politik yang melakukan pengaduan pada KPU Provinsi untuk dilakukan perubahan nomor urut pencalonan,

Menurut Pasal 67 undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 menyebutkan bahwa urutan nama calon dalam daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota untuk setiap daerah pemilihan disusun oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu berdasarkan tingkatannya. Jadi Komisi Pemilihan Umum tidak menetapkan nomor urut calon anggota DPRD, sebab hal tersebut dilakukan oleh Partai Politik.

Pasal 10 (2) b. undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dicantumkan Surat pernyataan pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya, bahwa nomor urut dan nama-nama calon yang tercantum dalam daftar calon sebagaimana merupakan hasil seleksi secara demokratis dan terbuka

Sebagaimana wawancara tanggal 5 Juni 2007 yang dilakukan di kantor Komisi Pemilihan Umum kepada salah satu Anggota Panitia pendaftaran dan penelitian calon anggota DPRD, Syaifuddin (kepala bagian Pogram dan teknis penyelenggaraan) mengatakan bahwa pada tahap verifikasi calon anggota ada saja elemen yang berkepentingan untuk mempertanyakan kepada tim Pokja untuk

dilakukan perubahan nomor urut, sedangkan dalam hal penetapan nomor urut itu dilakukan oleh partai politik, realitas tersebut Syarifuddin hanya menegaskan bahwa Bukan wewenang Komisi Komisi Pemilihan Umum Propinsi, tetapi ditetapkan oleh partai politik, jadi silahkan melakukan perubahan nomor urut kepada Parpol anda.

Diperjelas Faid Kasubag Program (wawancara tanggal 6 Juni 2007) bahwa “salah satu Partai yang mendatangi KPU Propinsi untuk meminta keterangan boleh tidaknya terjadi perubahan nomor urut adalah dari Partai Pelopor walau tidak dapat diungkapkan nama yang dari anggota Partai yang dimaksud”.

Bahwa surat pernyataan calon anggota DPRD tidak harus ada, sebab telah disediakan formulir sebagai legitimasi kesediaan dalam formulir, dan ditanda tangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya dengan menggunakan cap (stample). Sebagaimana Pasal 12 (2) a keputusan KPU No. 675 Tahun 2003. menyebutkan bahwa Surat pernyataan kesediaan menjadi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh calon dan diketahui oleh pimpinan partai politik sesuai tingkatannya serta dibubuhi cap dengan menggunakan formulir yang ditetapkan.

Untuk membuktikan kewarganegaraan calon anggota DPRD maka Panitia pendaftaran dan penelitian dalam melakukan verifikasi menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau surat domisili dari RT atau RW, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum melakukan Koordinasi dengan Pemerintah daerah sesuai asal calon anggota DPRD yang akan diketahui keabsahan kewarganegaraanya. Koordinasi lain yang dilaukan KPU untuk mengetahui legalitas calon anggota DPRD juga kerjasama dengan instansi seperti Kejaksaan, kepolisian.

Kerjasama kepolisian dengan panitia pendaftaran dan penelitian dalam hal ini ketika terdapat calon anggota DPRD yang mengajukan syarat kelakuan baik dengan keterangan dari kepolisian bahwa pernah melakukan tindak pidana. Yang dikoordinasikan dengan pihak kepolisian adalah diktum maksimal penjara 5 (lima) tahun. Ketika hasil tersebut terdapat lima tahun atau lebih pidana penjara maka dianggap tidak lolos syarat menjadi calon anggota DPRD. sebagaimana dalam Pasal 60 Point I Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 yaitu tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih;

Komisi Pemilihan Umum sama sekali tidak memberikan kebijaksanaan terhadap calon anggota DPRD yang pernah atau sedang menjadi anggota organisasi terlarang. sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003. bahwa syarat Calon anggota, DPRD Provinsi, harus memenuhi syarat: Point (g) yaitu bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya;

Terjadinya kesalahan dan ketidak pahaman calon anggota DPRD dan atau Partai Politik dikarenakan Panitia Pendaftaran dan penelitian hanya melaksanakan tugas *Pertama* meneliti berkas kelengkapan calon peserta *Kedua*, ketika terjadi kekurangan maka dikembalikan kepada partai Politik bersangkutan. Sedangkan sebagai acuan tugas panitia pendaftaran dan penelitian calon anggota DPRD Provinsi pada Pemilihan umum 2004 berdasarkan SK KPU Provinsi Nomor: 434/KPU-SS/XII/2003 yaitu;

- a. Membagikan Formulir Kepada Partai Politik
- b. Meneliti berkas Kelengkapan Administrasi calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
- c. Memberikan Penjelasan/Sosialisasi tentang tatacara pengisian formulir kepada Partai Politik peserta Pemilu 2004

- d. Mengkoordinasikan Kegiatan pendaftaran dan penelitian pada parpol sebagai peserta Pemilu 2004
- e. Meneliti ulang berkas Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan apabila terdapat kekurangan berkas
- f. Membuat laporan hasil kerja panitia pendaftaran dan penelitian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kepada KPU.

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai pandangan partai politik terhadap implementasi wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, di bawah ini peneliti mendeskripsikan bahwa:

- 1. Partai politik dalam melakukan pendaftaran calon anggota DPRD adalah menggunakan formulir.
- 2. Adanya umpan balik verifikasi dari KPU Provinsi kepada partai politik.
- 3. Adanya transparansi hasil verifikasi penelitian calon anggota DPRD Provinsi dari KPU Provinsi kepada partai politik.
- 4. Kesempatan memperbaiki berkas. Responden Partai Politik mengakui adanya kesempatan yang diberikan KPU dalam melengkapi syarat pencalonan anggota DPRD Provinsi yang masih kurang.

5. Keikutsertaan partai politik dalam penetapan calon anggota DPRD Provinsi. Partai Politik dilibatkan dalam penetapan calon anggota DPRD Provinsi. Demikian juga diungkapkan Farid Panitia Pendaftaran dan penelitian berkas pencalonan (wawancara tanggal 5 Juni 2007) bahwa selain anggota KPU, Panwaslu, Partai Politik, juga dilibatkan LSM dan NGO ungkapnya. Hanya saja saat diminta keterangan secara tertulis (absensi yang hadir) tidak dapat memeperlihatkan bukti secara tertulis, dengan alasan bahwa absensi pada penetapan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sudah tidak ada/hilang bagi penulis ini menandakan bahwa KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak tertib administrasi.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan secara maksimal melaksanakan wewenangnya, mengenai surat pernyataan sikap kesediaan calon anggota tidak harus menggunakan surat pernyataan sikap sebab dalam formulir di sudah termaktub pernyataan kesediaan calon anggota DPRD.

2. KPU Kabupaten Bulukumba

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bulukumba adalah penyelenggara Pemilihan Umum ditingkat Kabupaten. Berdasarkan data daftar pemilih tetap legislatif dan jumlah TPS Kabupaten Bulukumba yang diperoleh dari KPU Bulukumba bahwa terdiri 10 kecamatan, 125 desa/kelurahan, 372.031 Penduduk, dan pemilih tetap berjumlah 251.287 pemilih, serta 936 jumlah TPS. sebagai perbandingan dengan Kep. KPU No.23 Tahun 2004 Tentang Jumlah pemilih dan jumlah Tempat TPS dalam Pemilihan Umum 2004, dapat dilihat pada bagan dibawah ini

Bagan VIII Perbandingan data KPU Kabupaten Bulukumba dan Keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2004

Versi	Jumlah Kecamatan	Jumlah Pemilih Tetap	TPS
Kep. KPU No.23 Tahun 2004	0	250.443	1.051
Data KPU Bulukumba	10	251.387	936

Sumber: Adaptasi Kep.KPU No.23/2004 dan Data KPU Bulukumba

Dari perbandingan data antara KPU Bulukumba dan Kep. KPU No.23 Tahun 2004 Jumlah pemilih dan jumlah Tempat TPS dalam Pemilihan Umum 2004, terdapat perbedaan pada Jumlah Kecamatan, jumlah pemilih tetap dan TPS. Dari data sebagaimana bagan tersebut di atas, yang lebih ironis sebab Keputusan KPU

menunjukkan di Kabupaten Bulukumba tidak terdapat Kecamatan, tetapi terdapat pemilih dan TPS. Dapat ditafsirkan bahwa pada jumlah Kecamatan kesalahan ada pada Keputusan KPU yang mencantumkan 0 (nol) kecamatan di Bulukumba, dalilnya bahwa berdasarkan hasil penelitian, pada Tahun 2004 jumlah Kecamatan di Bulukumba berjumlah 10 Kecamatan. Menurut anggota KPU Bulukumba pada saat diwawancarai (tanggal 4 Agustus 2007) bahwa perbedaan jumlah kecamatan adalah kesalahan pada KPU pusat yang tidak berdasarkan pada Jumlah Kecamatan yang ada pada bulukumba. Sebagaimana yang telah diusulkan keada KPU pusat bersamaan dengan jumlah pemilih tetap hasil dari P4B dan jumlah TPS yang dibutuhkan di wilayah KPU Bulukumba.

Kesalahan lain pada perbandingan data yang diperoleh peneliti adalah Jumlah pemilih tetap keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2004 dimaksudkan jumlah pemilih tetap di Bulukumba adalah berjumlah 250.443 sedangkan data acuan KPU Bulukumba adalah 251.387. artinya bahwa pada pelaksanaan pemilihan Umum di Bulukumba sekiranya yang benar adalah keputusan KPU maka KPU Bulukumba terjadi *Mark-Up* jumlah pemilih yang dilakukan KPU Bulukumba dengan kalkulasi $251.387 - 250.443 = 944$ Pemilih. Saat diminta keterangan dari anggota KPU menggambarkan bahwa terkadang jumlah pemilih tetap yang diusulkan di KPU Pusat, KPU

pusat tidak cermat sehingga pada pelaksanaan terjadi perbedaan jumlah pemilih.

Jumlah TPS juga mengalami perbedaan data antara Keputusan KPU dengan jumlah 1.051 TPS dan data KPU Bulukumba 936 TPS. Berarti KPU Bulukumba tidak melaksanakan aturan secara maksimal. Dengan dalil tidak menyesuaikan jumlah TPS sebagaimana di maksudkan dalam Keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2004. sebagaimana diungkapkan oleh anggota KPU Bulukumba Arum Spink (wawancara tanggal 5 Agustus) penjelasannya mengenai perbedaan jumlah TPS, yaitu

- a. Karena adanya yang meninggal dunia
- b. Adnya maysrakat yang berangkat merantau
- c. Pindah rumah
- d. KPU Pusat langsung menetapkan jumlah TPS, yang berbeda kenyataanya dilapangan.

Mempersandingkan argumentasi anggota KPU dengan Keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2004 bahwa SK tersebut sebagaimana dalam konsederan penetapan, ditetapkan berdasarkan;

1. Data hasil pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) untuk Pemilihan Umum Tahun 2004 dan

2. Berdasarkan atas usulan pembentukan TPS dari Daerah.

Sedangkan keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2004 adalah digunakan sebagai dasar distribusi barang keperluan pelaksanaan Pemilihan Umum, Pembentukan Organisasi Pelaksana Pemilu di Daerah, pengadaan barang/jasa, keperluan pelaksanaan angkutan, dan anggaran biaya Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2004. sehingga harus sesuai dengan jumlah kebutuhan yang dilaporkan dari KPU Kabupaten /Kota dengan distribusi kebutuhan KPU Kabupaten/Kota pada pelaksanaan pemilihan Umum legislatif pada Tahun 2004.

Pada penyampaian Daftar Pemilih Sementara: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bulukumba melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana diungkapkan oleh anggota KPU Daerah Bulukumba Arum Spink (Bulukumba 4 Juli 2007) memberikan alasan "*Karena institusi yang berwewenang melakukan pendataan adalah BPS*" sehingga pada pelaksanaan pendaftaran pemilih di Kabupaten Bulukumba KPU melaksanakan sesuai dengan amanah dalam peraturan. Lebih lanjut dikatankan Arum Spink bahwa pada mekanismenya adalah "*pendataan dilakukan oleh BPS, selanjutnya hasil tersebut (Daftara Pemilih Sementara) diserahkan ke KPU dan disahkan menjadi daftar pemilih tetap*".

KPU Bulukumba melakukan penyampaian kartu pilih kepada Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) sebagaimana diungkapkan anggota PPK Khasmsah dari Kec. Bontotiro Kabupaten Bulukumba bahwa PPK membentuk tugas KPU Kabupaten yaitu

- a. melakukan sosialisasi tentang undang-undang pemilu 12 Tahun 2003
- b. menyampaikan kartu pilih kepada PPS
- c. penyampaian daftar pilih sementara kepada BPS
- d. mengkualifikasi hasil pemilihan umum di kecamatan
- e. membentuk PPS

Demikian juga diungkapkan oleh PPS pada penyampaian kartu pilih KPU kepada PPS Iskandar (4 Juli 2007) membenarkan adanya penyampaian kartu pilih dengan alasan “sebagai dasar pegangan bagi masyarakat bahwa benar yang bersangkutan adalah warga setempat dan layak untuk ikut memilih”.

Responden pada tingkat masyarakat pilih H.Tjamiruddin (3 Juli 2007) pada penyampaian akhir kartu pilih membenarkan kinerja PPS dengan menjawab “ya”.

Pada penyapaian kartu pilih yang dilaksanakan KPU Daerah Bulukumba dijalankan sesuai dengan mekanisme mulai dari KPU Daerah, PPK, PPS sampai pada masyarakat. Sehingga ada

keteraturan hirarki kinerja KPU Daerah Bulukumba dalam melaksanakan Pemilihan Umum Legislatif di Sulawesi Selatan secara maksimal dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bone, guna mengetahui implementasi pendaftaran pemilih pada pemilihan umum legislatif di Sulawesi Selatan sebagai sampel penelitian adalah Kabupaten Bone dengan memberikan daftar pertanyaan yang dijawab oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bone sebagai responden.

Berdasarkan data dari KPU Kabupaten Bone menurut Data Penduduk, pemilih dan TPS pada pemilu 2004 adalah Kabupaten Bone terdiri atas 27 Kecamatan, 372 Desa/Kelurahan, penduduk berjumlah 684.768 Jiwa, Pemilih (P4B) 449.864, Pemilih 250.812, dengan jumlah TPS 1.712. dari data yang diperoleh peneliti terdapat kesalahan pada data penduduk dari sumber KPU Bone dan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Jumlah Pemilih dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilu 2004, guna mengetahui kesalahan perbedaan tersebut sebagaimana bagan dibawah ini:

Bagan IX perbandingan data KPU Kabupate Bone dan Keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2004

Versi	Jumlah PPS	Jumlah Pemilih	TPS
Kep. KPU No.23 Tahun 2004	376	453.443	1.705
Data KPU Bone	372	450.812	1.712

Sumber: adaptasi Kep.KPU No.23/2004 dan Data KPU Bone

Dari pespektif antara data yang diperoleh peneliti dari KPU Bone dengan data yang berdasarkan keputusan KPU terdapat kesalahan data pada Jumlah, PPS, Jumlah pemilih, dan TPS. Daam hal ini adalah.

Pertama, Jumlah PPS menurut SK KPU tidak berdasarkan pada jumlah Data yang diperpegangi KPU daerah Bone. menurut ketua KPU Bone untuk jumlah PPS adalah berdasarkan jumlah Desa/Kelurahan yaitu 372 Desa/Kelurahan. Sedangkan yang mengalami kesalahan adalah Keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2003 menerangkan bahwa jumlah PPS di Kabupaten Bone adalah berjumlah 376 terjadi kelebihan 4 (empat) PPS.

Kedua, Jumlah pemilih tetap menurut keputusan KPU adalah 453.443 pemilih, sedangkan menurut perolehan data dari KPU Bone adalah berjumlah 450.812 artinya bahwa ada kekurangan jumlah pemilih yang terjadi di Kabupaten bone sekitar 2631 jumlah pemilih.

Ketiga, Jumlah TPS menurut keputusan KPU adalah berjumlah 1. 705 sedangkan KPU Bone adalah 1.712. artinya bahwa ada kelebihan jumlah TPS yang beda menurut keputusan KPU, hal

tersebut menurut Ketua KPU Bone saat wawancara via telephon (4 Agustus 2007) bahwa Pada jumlah TPS memang ada tambahan TPS karena tidak cukup, maka diminta kepada Pemerintah daerah untuk membiayai kelebihan 7 (tujuh) TPS.

Menganalisis hal tersebut maka Komisi Pemilihan Daerah Kabupaten Bone pada pelaksanaan Pemilu legislatif pada penetapan Jumlah Pemilih tetap, TPS, adalah tidak berdasarkan pada keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang jumlah pemilih dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pemilihan Umum Tahun 2004. sedangkan jumlah PPS yang ditetapkan KPU Pusat tidak berdasarkan jumlah Desa/Kelurahan.

Pada penetapan jumlah pemilih tetap dan jumlah TPS Seharusnya anggota KPU Bone mengacu pada aturan keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2004 yang lahir dari mekanisme olah data oleh badan pusat statistik (BPS) Kabupaten Bone, selanjutnya diserahkan kepada KPU Bone , PPK, dan selanjutnya pemutakhiran data pada tingkat PPS, berurut kembali sampai pada KPU pusat yang dijadikan landasan menerbitkan keputusan KPU tersebut.

Namun demikian tidak selamanya juga aturan Keputusan KPU harus diperpegangi karena juga terjadi kesalahan yang cukup signifikan. dalam hal ini tidak sesuai dengan kondisi lapangan (Kabupaten) .

Penyampaian Daftar Pemilih Sementara Komisi Pemilihan Umum melaksanakan dengan bekerjasama /berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) daerah Kabupaten Bone. Ini menggambarkan bahwa dalam rangka penyampaian daftar pemilih dan pendataan penduduk secara berkelanjutan KPU Kabupaten Bone melakukan kerjasama/koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone sebagaimana alasan Ali Imran Ketua KPU Kabupaten Bone bahwa karena setelah pemerintah menetapkan statistik untuk pendataan penduduk dan pemilih, maka KPU harus bekerjasama dengan statistik. “statistik” yang dimaksudkan adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone.

Lebih lanjut Ali Imran diungkapkan bahwa wewenang BPS adalah “menyerahkan daftar pemilih yang telah disusun BPS kepada KPU, untuk dijadikan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Penyampaian Kartu Pemilih kepada PPS, KPU Kabupaten Bone dilaksanakan melalui PPK untuk diteruskan kepada PPS. Sebagaimana diungkapkan oleh Andi Azwar Azis anggota PPK pada hasil wawancara tanggal 8 Juli 200 bahwa KPU memerintahkan kepada PPK untuk membagi kartu pemilih guna disampaikan kepada PPS. demikian juga pertanyaan melalui kusioner yang diberikan kepada anggota PPS, bahwa apakah KPU menyampaikan kartu pemilih kepada PPS? anggota PPS Imran menyatakan “*tidak*” dengan

alasan bahwa *“KPU menyampaikan kartu Pemilih melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk diserahkan kepada PPS”* alasan tersebut menggambarkan bahwa KPU melaksanakan penyampaian kartu pemilih kepada PPS melalui PPK. Sehingga PPK juga menggambarkan bahwa telah melaksanakan wewenangnyanya yaitu membantu tugas-tugas KPU. sebagaimana Andi Azwar Azis anggota PPK saat diberikan pertanyaan, bahwa tugas –tugas PPK dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah

- a. membantu KPU mensosialisasikan undang-undang yang berlaku
- b. memonitor aktifitas kampanye Parpol
- c. mengawasi aktifitas PPS atau memonitor Pemilu
- d. merekapitulasi hasil perhitungan suara
- e. mengumpulkan surat suara dari PPS dan mengirim ke KPU.

Sebagai tambahan bahwa PPK juga membantu KPU dalam pelaksanaan tugas KPU sebagaimana wawancara PPK tersebut di atas.

Sebagai panyampaian akhir kartu pemilih untuk dipergunakan dalam pencoblosan sebagaimana anggota masyarakat saat diberikan pertanyaan bahwa apakah dalam pemilihan umum Tahun 2004 menggunakan kartu pemilih untuk melakukan pencobosan?. Murniati anggota masyarakat dengan menjawab *“ya”* dari salah satu responden maka penyampaian kartu pemilih dari KPU Kabupaten, PPK, PPK

dilaksanakan sampai tingkat masyarakat (pemilih) untuk dipergunakan dalam pencoblosan.

b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Barru sebagai sampel dalam penelitian, dengan masing–masing reponden 1 (satu) dari anggota KPU, PPK, PPS, dan masyarakat.

Berdasarkan data tentang jumlah pemilih legislatif pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru Tahun 2004 yang diperoleh dari KPU Barru mengalami perbedaan dengan Keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Jumlah pemilih dan jumlah TPS dalam Pemilihan Umum 2004, perbedaan tersebut dapat dilihat sebagaimana bagan di bawah ini

Bagan X Perbedaan data pada pemilu 2004 Kabupaten Barru

Versi	Jumah kecamatan	Jumlah desa /kelurahan	Jumlah Pemilih	TPS
Keputusan nomor 23 Tahun 2004	7	54	106.346	418
Data KPU Barru	7	54	105.350	418
Jumlah	-	-	996	-

Sumber: adaptasi Kep.KPU No.23/2004 dan Data KPU Barru

Dari bagan tersebut di atas nampak tidak terjadi perbedaan yang signifikan pada; jumlah kecamatan, jumlah desa dan kelurahan, dan TPS. Hanya pada jumlah pemilih yang terjadi perbedaan antara Keputusan KPU berjumlah 106.346 pemilih, menurut versi KPU Barru jumlah pemilih berjumlah 105.350 artinya bahwa terdiri atas 996 pemilih tidak memberikan hak pilihnya. Suatu kesalahan dalam implementasi pemilihan umum legislatif pada daerah Barru, jumlah 996 pemilih merupakan jumlah yang cukup banyak dimana tidak memberikan hak pilihnya dalam pemilihan umum legislatif di Kabupaten Barru. Kesalahan tersebut menurut penulis adalah kesalahan pada KPU Barru sebab lahirnya Keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2004 adalah keputusan yang berdasarkan hasil Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) untuk Pemilihan Umum Tahun 2004 serta usulan pembentukan TPS dari Daerah.

Pada Penyampaian Kartu Pemilih dari KPU kepada PPK, Komisi Pemilihan Umum Barru melaksanakan secara maksimal sebagaimana diungkapkan anggota PPK tanete Rilau. Menurut Amiruddin (hasil wawancara 11 Juli 2007) bahwa “KPU menyampaikan Kartu Pemilih kepada PPK, untuk disampaikan kepada PPS kepada masyarakat untuk dipergunakan dalam melakukan pencoblosan” ditambahkan anggota PPS saat dalam pertanyaan kusioner apakah

KPU menyampaikan kartu pemilih kepada PPS? dengan jawabam “ya” tidak memberikan alasan. Demikian juga pada anggota masyarakat pada daftar kousioner juga menjawab “ya” artinya bahwa masyarakat mempergunakan kartu pemilihan dalam melakukan pencoblosan. Dengan mendapatkan kartu pemilih dari PPS setempat.

Penyampaian Daftar Pemilih Sementara KPU “tidak” melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Barru, dengan alasan anggota KPU saat diberikan kousioner bahwa *“KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana amanat undang-undang adalah pengguna data terakhir kependudukan”*

Penyampaian Daftar Pemilih Sementara dilaksanakan oleh KPU Barru yang diteruskan kepada PPK untuk dibagi kepada PPS untuk ditetapkan. Mekanisme penetapan pemilih sementara yang dilakukan oleh anggota PPS Desa Corawali sebagaimana Ardi bahwa *“mekanisme yang dilaksanakan berdsarkan pada data P4B yang dikelola oleh BPS”* dari data tersebut menjadi acuan PPS untuk melakukan *cross chek* di masyarakat dan selanjutnya PPS melakukan pemutakhiran data atau penetapan daftar pemilih sementara menjadi daftar pemilih tetap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka ada beberapa hal yang perlu ditarik benang merah sebagai berikut :

1. Pendaftaran dan penetapan pemilih, KPU Kabupaten/kota melaksanakan sesuai dengan mekanisme dalam peraturan. Namun pada jumlah pemilih tetap, KPU Kabubapten/Kota tidak berlandaskan pada peraturan yang telah ditetapkan, sehingga KPU Kabupaten/Kota salah pada jumlah daftar pemilih tetap yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pada pemilihan umum legislatif tahun 2004.

2. Mekanisme Pencalonan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan. Namun KPU Provinsi Sulawesi Selatan kurang cermat dan tidak transparan pada daftar calon anggota DPRD Provinsi yang bermasalah, terutama calon anggota DPRD Provinsi yang berijasa palsu

B. Saran

Berdasarkan apa yang penulis uraikan dalam beberapa kesimpulan di atas, maka perkenankanlah penulis menyampaikan saran-saraan yang mungkin dapat bermanfaat :

1. Pada daftar pemilih tetap KPU Kabupaten/Kota harus mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan,. Sebab data pemilih tetap berdasarkan peraturan adalah ditetapkan berdasarkan usulan dari daerah kabupaten/kota masing-masing, sehingga menjadi acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
2. KPU Provinsi Sulawesi Selatan harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan kepada Partai Politik tentang syarat pencalonan anggota DPRD, sehingga tidak terjadi kesalahan pada kepada partai politik.dan pada proses pencalonan anggota DPRD. Demikian juga pada partai politik kiranya memahami dan mempelajari undang –undang pemilu sehingga pada pelaksanaannya tidak selalu diselesaikan secara “diplomatic” akan tetapi berlandaskan pada aturan yang telah ditetapkan. Demikian juga pada KPU harus transparan terhadap calon legislatif yang bermasalah terutama calon anggota DPRD yang berijasa palsu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi Emilianus, 2005 *Menggugat Negara Rasionalitas Demokrasi, HAM dan Kebebasan*, Penerbit PBHI dan European Union: Jakarta.
- Affan Gaffar, 1997 *Membangun Budaya Politik Melalui Pemilu*, Afkar, IV: 38-56
- Ahmad Nadir, 2005. *Pilkada Langsung Dan Masa Depan Demokrasi* Averroes Press, Malang
- Alfan Alfian, M., Dkk 2005 *Bagaiman Memenangkan Pilkada Langsung*, Akbar Tanjung Institute, Jakarta.
- Apeldoorn Van, 1954 *Pengantar Ilmu Hukum* PT. Pradnya paramita: Jakarta
- Bagir Manan, 2002 *Jalan Berbelit Menuju Pemerintahan Yang Baik* Makalah Universitas Padjajaran: Bandung
- Dede Rosyada, Dkk. 2003 *Demokrasi Hak asasi Manusia dan Masyarakat Madani* ed. Revisi, ICCE UIN Syarif Hidayatulah, Jakarta,
- Fahmal, Muin, 2006. *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih* Diterbitkan Ull Press
- Fatah, Eep Saifullah, 1999 *Membangun Oposisi: Agenda-Agenda Perubahan Politik Masa Depan*, Remaja Rosda Karya: Bandung
- Fukuyama Francis, 2005 *Memperkuat Negara Tata Pemerintahan Dan Tata Dunia Abad 21*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Haris, Syamsuddin, 1994 *Demokrasi di Indoensia: Gagasan dan Pengalaman*, diterbitkan LP3S: jakarta
- Harjon, Philipus M., 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu: Surabaya
- John Gilissen Emiritus, Dkk. 2005 *Sejarah Hukum suatu Pengantar*, PT. RAfika Aditama: Jakarta Martimer Edwar, *Islam Dan Kekuasaan*, Mizan: Jakarta
- Kansil, C.S.T 1983 *Sistem Pemerintahan Indonesia Aksara Baru*: Jakarta

- Kranenburg, Dkk. 1955 *Ilmu Negara Umum*, Pradnya Paramitha: Jakarta
- Mahendra, Yusril, Ihza, 1996. *Dinamika Tata Negara Indonesia*, gemainsani press Jakarta
- Maskuri, Abdul, 1999. *Demokrasi Dipersimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi*, Tiara Wacana: Jakarta
- Morissan,. 2005 *Hukum tata negara era reformasi* Ramdina Prakarsa, Jakarta
- Mulia, Musda 1999, *Modul Pemberdayaan Muballighat* diterbitkan Korps Eanita MDI-The Asia Foundation: Jakarta
- Muis, Asda, RMS 2007, *KPU Sulsel Tepi Badai* diterbitkan Citra Pustaka. Yogyakarta.
- Ni'matul Huda,. 2006. *Hukum Tata Negara Indonesia* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Oka Mahendra, A. A., 2005 *Pilkada Di Tengah Konflik Horizontal* PT. Dyatama Milenia, Jakarta
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sieimen, Aan, DKK, 2002 *Penyusunan Rancangan Undang-undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis* Elips
- Wignjodipoero, Soerojo, 1985. *Pengantar Ilmu Hukum*, Gunung Agung : Jakarta

Bacaan Lain :

- Jurnal Politika Bulanan Eksperimentasi Politik Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi Vol No.1 Mei 2005
- Jurnal Amanagappa Vol 13 Nomor 2 Juni 2005
- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang No 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Keputusan KPU Nomor 172 Tahun 2003 tentang organisasi dan tata kerja panitia pemungutan suara dan elompok penyelenggara pemungutan suara

Keputusan KPU Nomor 165.2 Tahun 2002 tentang pelaksanaan pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan.

Keputusan Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2003 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan KOMisi Pemilian Umum Kabupaten/kota

Keputusan KPU Nomor 675 Tahun 2003 tentang tata cara pencalonan pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, da dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah Kabuaten/Kota

Keputusan KPU Sulawesi Selatan Nomor 434/KPU-SS/XII/2003 tentang pembentukan panitia dan sekertaris pendaftaran dan penelitian calon anggota DPRD Provinsi pemilu 2004 Perovinsi Sulawesi Selatan

Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 237/KPU-SS/IX/2003 Tentang pembentukan Panitia Pendaftaran, penelitian dan pnetapan partai politik sebagai peserta Pemilu 2004.

Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Tahap Penyelenggaraan

Keputusan KPU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas keputusan Nomor 16 Tahun 2004 tentang jumlah penduudk dan jumlah tempat Pemungutan suara (TPS) dalam pemilihan Umum Tahun 2004

Keputusan KPUD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 193/KPU-SS/VIII2003 Tentang pembentukan divisi pembedangan Tugas anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Surat Keputusan KPU Nomor 174 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I

Keputusan KPU Nomor : 100 Tahun 2003

TAHAP PENYELENGGARAAN			
1. Pendaftaran Pemilih.			
d. Pendataan Pemilih dan Penduduk (pelaksanaan P4B) secara serentak.	1 Apr – 30 Apr 2003	Dilaksanakan oleh Petugas Pendaftar.	
f. Penyampaian Jumlah Penduduk dan Jumlah Pemilih Sementara oleh BPS kepada KPU	15 – 30 Jun 2003	Bahan penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi DPR, DPRD Provinsi /Kabupaten/Kota.	
g. Penetapan jumlah penduduk untuk tiap Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan.	1 – 7 Jul 2003		
h. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara yang disusun oleh BPS dan KPU Kabupaten /Kota kepada PPS untuk mendapatkan pengesahan.	15 – 29 Okt 2003	BPS dan KPU Kab/ Kota.	
i. Penyampaian Daftar Penduduk Sementara yang disusun oleh BPS dan KPU Kabupaten /Kota kepada Kepala Desa/Kelurahan.			
j. Penetapan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS.	30 Okt - 1 Nov 2003	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh PPS untuk mendapat tanggapan masyarakat.	
k. Pengumuman dan Tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara.	3 - 30 Nov 2003		
l. Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara dan penyusunan daftar pemilih tambahan.	1 Des – 22 Des 2003	Pemilih yang belum terdaftar dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.	
p. Penyampaian Kartu Pemilih oleh KPU Kab/Kota kepada pemilih melalui PPS	24 Des 03 – 5 Mar 04		
4. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota			
b. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	22 Des 03 – 26 Jan 04		
1) Pengambilan formulir pencalonan.	9 – 19 Des 03		
a) Calon Anggota DPR di KPU			
b) Calon Anggota DPRD Provinsi di KPU Provinsi			
c) Calon Anggota DPRD Kabu- paten/Kota di KPU Kabupaten/kota.			
2) Pengajuan calon oleh Pengurus Parpol :	22 – 29 Des 03		
a) (a) Calon Anggota DPR kepada KPU.			
b) (b) Calon Anggota DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi			
c) Calon Anggota DPRD Kabu- paten/Kota kepada KPU Kabupaten/kota.			
3) Penelitian calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota.	23 Des 03 – 5 Jan 04	Untuk penelitian calon dibentuk Kelompok Kerja.	
4) Penyampaian hasil penelitian kepada Partai	27 Des 03 – 12 Jan		

	Politik peserta Pemilu.	2004	
5)	Kesempatan untuk melengkapi /memperbaiki syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	29 Des 03 – 19 Jan 04	
6)	Penetapan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	27 Jan 04	

Lampiran II

Nama dan urutan Partai politik yang lolos pemilu 2004 disulawesi Selatan

Nomor Urut	Nama Partai Politik
1	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
2	Partai Buruh social Demkrat
3	Partai Bulan Bintang
4	Partai Merdeka
5	Partai Persatuan Pembangunan
6	Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan
7	Partai Perhimpunan Indonesia Baru
8	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan
9	Partai Demokrat
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
11	Partai Penegak Demokrasi Indonesia
12	Partai Persatuan Nahdatul Ulama Indonesia
13	Partai Amanat Nasional
14	Partai Karya Peduli Bangsa
15	Partai Kebangkitan Bangsa
16	Partai Keadilan Sejahtera
17	Partai Bintang Reformasi
18	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
19	Partai Damai Sejahtera
20	Partai Golongan Karya
21	Partai Patriot Pancasila
22	Partai Serikat Indonesia
23	Partai Persatuan Daerah
24	Partai Pelopor

Lampiran III

Keputusan KPUD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 193/KPU-SS/VIII2003
*Tentang pembentukan divisi pembedangan Tugas anggota
 KPU Provinsi Sulawesi Selatan.*

Nama dan struktur anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Nama Anggota KPU Sul-Sel	Devisi Pembedangan	Jabatan
1	H. Aidir Amin Daud, SH., MH.	Hubungan Partai Politik	Ketua
2	Drs. H. A. Salipolo Palalloi	Internal/Hubungan Pemerintahan Daerah (Keuangan Logistik)	Anggota
3	Ridwan J. Silamma, SH.	Sosialisasi dan Pendidikan	Anggota
4	Drs. H. M. Darwis, MA, DPS	Hukum	Anggota
5	Mappinawang, SH	Hubungan Masyarakat dan pengelolaan Data	Anggota

Lampiran IV

Panitia dan sekretaris pendaftaran dan penelitian calon anggota DPRD

Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 434/KPU-SS/XII/2003 tentang pembentukan panitia dan sekretaris pendaftaran dan penelitian calon anggota DPRD Provinsi Pemilu 2004 Provinsi Sulawesi Selatan. Tertanggal tanggal 22 desember 2003. Sebagaimana daftar komposisi dan pesonalia berikut ini :

Daftar Komposisi dan Pesonalia Panitia

No	Nama Koordinator Penanggung Jawab dan Sekertaris	Kedudukan Dalam Kepanitian
1	H. Aidir Amin Daud, SH, MH.	Penanggung Jawab
2.	Drs. H.M. Darwis, MA.DPS Drs.	Ketua Pelaksana
3.	H.A. Salipolo Palalloi	Koordinator
4.	Ridwan Djohnny Silamma, SH.	Koordinator
5.	Mappinawang, SH.	Koordinator
6.	Drs. Onesmus Matantu	Sekertaris
7	Drs. Abiding Nassa	Wakil Sekertaris

Lampiran IV

keputusan KPU Provinsi Nomor: 237/KPU-SS/IX/2003. tentang pembentukan panitia pendaftaran penelitian dan penetapan Partai Politik sebagai peserta pemilihan umum 2004 provinsi Sulawesi Selatan. Putusan tersebut dimaksudkan yaitu

No	Nama Koordinator Penanggung Jawab dan Sekertaris	Nama Pendamping	Ket.
1	H. Aidir Amin Daud, SH, MH.	1. Drs.M.Adnan Tahir 2. Marzuki	Koord. TIM
2.	Drs. H.A. Salipolo Palalloi	1. Drs. Ahmad Abdullah 2. Ir. Rusman Nontji	
3.	Drs. H.M. Darwis, MA.DPS	1. Drs. Abidin Nassa 2. Ir. Farid Sahrullah	
4.	Mappinawang	1. Drs. A.M. Arifin 2. A. Fadellang, SH.	
5.	Ridwan Djohnny Silamma, SH.	1. Drs. Syarifuddin 2. H. Naim Jamal, SE	
6.	Drs. H. Mustafa Rauf, M.Si		Sekertaris TIM

Ditetapka Makassar, 10 September 2003